

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN
2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH DALAM
MENINGKATKAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN
DI SMP NEGERI 6 NATAL**

SKRIPSI

Oleh:

AMRIANA

NPM. 14030100170

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : AMRIANA
N P M : 1403100170
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 6 NATAL

Medan, 16 Maret 2018

PEMBIMBING I


NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DISETUJUI OLEH:
KETUA JURUSAN,


NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Pt DEKAN,


Dr. RUDIANTO, M.Si



BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : AMRIANA
N P M : 1403100170
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, tanggal : Kamis, 22 Maret 2018
Waktu : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : IDA MARTINELLY, SH., MM

PENGUJI II : ARIFIN SALEH, Dr., M.SP

PENGUJI III : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

()
()
()

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. RUDIANTO, M.Si


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, **AMRIANA**, NPM: 1403100170 menyatakan dengan **sungguh – sungguh** :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang – Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan. Memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang – Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri. Bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai – nilai hasil ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018

Yang menyatakan,



AMRIANA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Order of Terpercaya
 Jumlah ini agar disebutkan
 tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : AMRIANA
 N P M : 1403100170
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMPETENSI GURU DALAM MENINGKATKAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI NATAL

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	25/02-2018	Perbaiki kalimat dan penulisan	<i>[Signature]</i>
2.	26/02-2018	Perbaiki bab II hasil penelitian	<i>[Signature]</i>
3.	2/03-2018	Perbaiki kalimat wawancara	<i>[Signature]</i>
4.	6/03-2018	Tambahkan kesimpulan pada wawancara	<i>[Signature]</i>
5.	9/03-2018	Perbaiki analisis data pada hasil penelitian.	<i>[Signature]</i>
6.	9/03-2018	Tambahkan teori pada analisis data	<i>[Signature]</i>
7.	10/03-2018	Perbaiki abstrak	<i>[Signature]</i>
8.	16/03-2018	Acc skripsi	<i>[Signature]</i>

Medan,Maret.....2018....

Dekan,

[Signature]
 Dr. RUOLANTO M.Si

Ketua Program Studi,

[Signature]
 (Naris Khairiah S.P.M.Pd)

Pembimbing ke :

[Signature]
 (Naris Khairiah S.P.M.Pd)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 6 NATAL

**OLEH:
AMRIANA
14030100170**

Sejak diberlakukannya desentralisasi pendidikan, memaksimalkan peran stakeholder sekolah dan masyarakat menjadi sangat penting dalam mendukung keberhasilan proses pendidikan di sekolah. Bentuk aktualisasi desentralisasi pendidikan diwujudkan dengan adanya komite sekolah yang diharapkan dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komite sekolah sebagai pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 6 Natal. Dengan aspek yang di lihat yaitu peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan peran sebagai mediator, peran tersebut adalah sebagai bentuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan amanat yang tertuang pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan subjek penelitian komite sekolah dan informasi pendukung dari kepala sekolah dan guru. Berdasarkan hasil penelitian peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang terbilang cukup baik.

Kata Kunci : Komite Sekolah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmatnya, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan didunia maupun di akhirat.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi ini berjudul : **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 6 NATAL”**.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Teristimewa dan yang paling utama, kepada Ayahanda penulis Amlan dan Ibunda tercinta Darsia yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dari awal sampai akhir kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Tasrif Syam, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus dosen pembimbing skripsi.

5. Dosen – dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Kepada seluruh teman – teman seperjuangan kelas B dan C – sore IAN konsentrasi Kebijakan Publik khususnya Rahayu Siska dan Enda Tiolina Sianipar, sahabat – sahabat yang telah banyak menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Maret 2017

Yang menyatakan,

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR TABEL ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 5

D. Sistematika Penulisan 6

BAB II URAIAN TEORITIS

A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik..... 8

B. Konsep Mutu Layanan Pendidikan 15

C. Konsep Komite Sekolah 21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 23

B. Teknis Pengumpulan Data 23

C. Defenisi Konsep	24
D. Teknik Analisis Data	25
E. Kerangka Konsep	26
F. Kategorisasi	27
G. Lokasi Dan Waktu Penelitian	28
H. Narasumber	29
I. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	30

BAB IV ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data	55
B. Analisis Data	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi Edward III	15
Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (model interaktif)	25
Gambar 3.2 Kerangka Konsep	26
Gambar 3.3 Struktur Organisasi SMP Negeri 6 Natal	54

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Status SMP Negeri 6 Natal	31
Tabel 3.2 Pihak pengajar/ketenagaan sekolah menurut golongan di SMP Negeri 6 Natal	31
Tabel 4.1 Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	55
Tabel 4.2 Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur	56
Tabel 4.3 Kondisi Narasumber Berdasarkan Pendidikan	57
Tabel 4.4 Fasilitas yang ada di SMP Negeri 6 Natal	57
Tabel 4.5 Keadaan Sarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Natal	58
Tabel 4.6 Data siswa berdasarkan kelas dan jenis kelamin	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menjadi faktor utama atau penentu bagi masa depan suatu bangsa. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Komite sekolah berkedudukan di setiap sekolah yang berfungsi untuk peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Komite Sekolah menjalankan tugas sesuai fungsinya berdasarkan prinsip gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel. Fungsi dari Komite Sekolah yaitu:

1. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 - a. kebijakan dan program sekolah;
 - b. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
 - c. Kriteria kinerja sekolah;
 - d. Kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan
 - e. Kriteria kerja sama sekolah dengan pihak lain.

2. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industry maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
3. mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja sekolah.

Dengan demikian Komite Sekolah berperan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan baik melalui peran perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, maupun organisasi kemasyarakatan. Melalui Komite Sekolah, masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Masyarakat juga memiliki kesempatan untuk terlibat dalam perencanaan, pengawasan, dan monitoring program pendidikan melalui dewan sekolah dan Komite Sekolah.

Salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah.

. Masyarakat adalah stakeholder pendidikan yang memiliki kepentingan akan keberhasilan pendidikan di sekolah, karena sekolah mengambil siswanya

dari masyarakat setempat, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. Masyarakat juga sebagai pembayar pendidikan, baik melalui uang sekolah maupun pajak, sehingga sekolah-sekolah seharusnya bertanggungjawab terhadap masyarakat. Oleh karena itu, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan pendidikan. Namun entitas yang disebut masyarakat itu terlalu kompleks, sehingga perlu adanya penyederhanaan agar mudah bagi sekolah untuk melakukan hubungan dengan masyarakat.

Keberadaan Komite Sekolah terkadang terbentur beberapa keterbatasan dan hanya dijadikan sebagai formalitas untuk melengkapi persyaratan administrasi sekolah. Selain itu pihak sekolah terkadang merasa terintimidasi dengan adanya komite sekolah. Bahkan pandangan orang tua siswa masih menganggap bahwa Komite Sekolah hanya sebagai BP3 yang hanya menarik dana dari orang tua siswa. Padahal tugas Komite Sekolah tidak semata memberikan sumbangan dana bagi sekolah tetapi juga berperan secara luas dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Peran Komite Sekolah juga tidak terlalu jauh mencampuri secara teknis manajerial sekolah karena hal tersebut merupakan wewenang kepala sekolah, tetapi juga tidak terlalu jauh meninggalkan peran yang harus dilaksanakan. Tapi fenomena di dunia pendidikan juga menunjukkan bahwa masih banyak pengurus Komite Sekolah yang tidak mengetahui ha-hal yang menjadi tugas untuk dilakukan. Oleh sebab itu Komite Sekolah hanya dijadikan sebagai simbol bagi pihak sekolah untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Dengan baragamnya pandangan tentang Komite Sekolah diharapkan Komite Sekolah mampu memberikan saran serta mendukung program-program yang diajukan sekolah. Selain itu Komite Sekolah harus dapat menjadi partner sekolah serta mediator untuk dapat mencari dukungan dari masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada di sekolah. Sehingga dapat mengubah pandangan negatif terhadap Komite Sekolah.

Namun Komite Sekolah di SMP N 6 Natal kurang berfungsi dan bisa dikatakan pasif dalam melakukan peranannya. Beberapa masalah dalam keterlibatan Komite Sekolah diduga seperti kurang terlaksananya tugas Komite Sekolah dalam memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan terkait kebijakan dan program sekolah maupun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah, serta kurangnya pengawasan pelayanan pendidikan di sekolah. Komite Sekolah juga cenderung sebagai badan legalitas (stempel) yang mengesahkan berbagai pungutan dana oleh pihak sekolah. Di samping itu pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan (orang tua, masyarakat sekitar bahkan guru) kurang mengetahui tentang fungsi dan peran Komite Sekolah. Selain itu ada yang beranggapan Komite Sekolah sama saja dengan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3), alias ganti kulit semata.

Dengan adanya masalah tentang komite sekolah dalam memberikan layanan dan berupaya meningkatkan mutu layanan pendidikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai meningkatkan mutu layanan pendidikan yang berjudul **“PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2016**

TENTANG KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH DI SMP NEGERI 6 NATAL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang peneliti buat, maka rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah dalam meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di SMP Negeri 6 Natal?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah dalam meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di SMP Negeri 6 Natal.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Penulis dapat menilai suatu kebijakan yang sudah sesuai diimplementasikan atau akan diimplementasikan, apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum.
- b. Bertambahnya pengetahuan penulis untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir dan kemampuan analisis penulis.
- c. Sebagai bahan masukan atau saran kepada sekolah agar sekolah yang dapat mengoptimalan perannya sebagai pencipta sumber daya manusia yang mandiri dikemudian hari.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang linnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari Konsep Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Komite Sekolah, Konsep Mutu Layanan Pendidikan.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Teknik Pngumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kategorisasi, Lokasi dan Waktu Penelitian, Narasumber.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Lane dalam Mulyadi (2016: 57), implementasi sebagai konsep dapat dibagi kedalam dua bagian. Pertama, *implementation = F (Intention, Output, Outcome)*. Sesuai defenisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Tine)*. Deddy Mulyadi (2016:167), juga menambahkan bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan.

Menurut Gordon dalam Pasolong (2008: 58) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sedangkan Menurut Merilee S. Grindle dalam Nugroho (2006: 634), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*), serta kondisi sumberdaya, infrasutruktur perlu pemahaman yang komprehensif.

Pressman dan Widavsky dalam Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Sedangkan menurut Deddy Mulyadi (2016: 37), kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu.

Taufiqurokhman (2016: 20) menyimpulkan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat. Dari definisi kebijakan publik menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa semua pembuatan kebijakan publik itu akan selalu melibatkan pemerintah , dengan cara tertentu.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005: 102) merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sebatier dalam Wahab (2001: 68) implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur prosesi implementasinya.

Menurut Zainal Abidin (2012: 155-157), terdapat pendekatan dalam implementasi kebijakan publik, antara lain:

1. Pendekatan struktural

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahanyang muncul dari kebijakan, maka perlu dilakukan:

Planning of change yakni perencanaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat internal organisasi.

Planning for change, yakni perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar.

2. Pendekatan prosedural/manajerial

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan (*planning, programming, budgeting, supervision, atau*

programming, evaluation, review technique). Yang paling penting dalam proses implementasi adalah prioritas dan tata urutan.

3. Pendekatan kewajiban/behavior

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplementasikannya. Tachjan (2006: 26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

a. Unsur pelaksana

Menurut Diamond dan Dimock dalam Tachjan (2006: 28), pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan, program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

b. Adanya program yang dilaksanakan

Program yang merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget.

Grindle juga menjelaskan bahwa isi program harus menggambarkan; “kepentingan yang dipengaruhi (*interest affected*), jenis manfaat (*type of benefit*), derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*), status pembuat keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementes*) serta sumberdaya yang tersedia (*resources committed*)”

c. *Target group* atau kelompok sasaran

Menurut Tachjan (2006: 35) mendefinisikan bahwa *target group* yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

Menurut George R. Terry dalam Mulyadi (2016: 27), faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan publik yaitu:

1. *Men (Human Resources)*, dalam manajemen publik, sumber daya manusia ini tidak hanya mampu , tetapi harus memenuhi persyaratan karier.
2. *Money (finances)*, dalam manajemen publik, money sangat terkait dengan ketentuan peruntukan dari mata anggaran yang telah disetujui terlebih dahulu.
3. *Material (Logistik)*,
4. *Machine (Information)*, manajemen publik dikelola melalui informasi yang berbentuk persuratan dan alat komunikasi lain serta dokumentassi dan arsip.

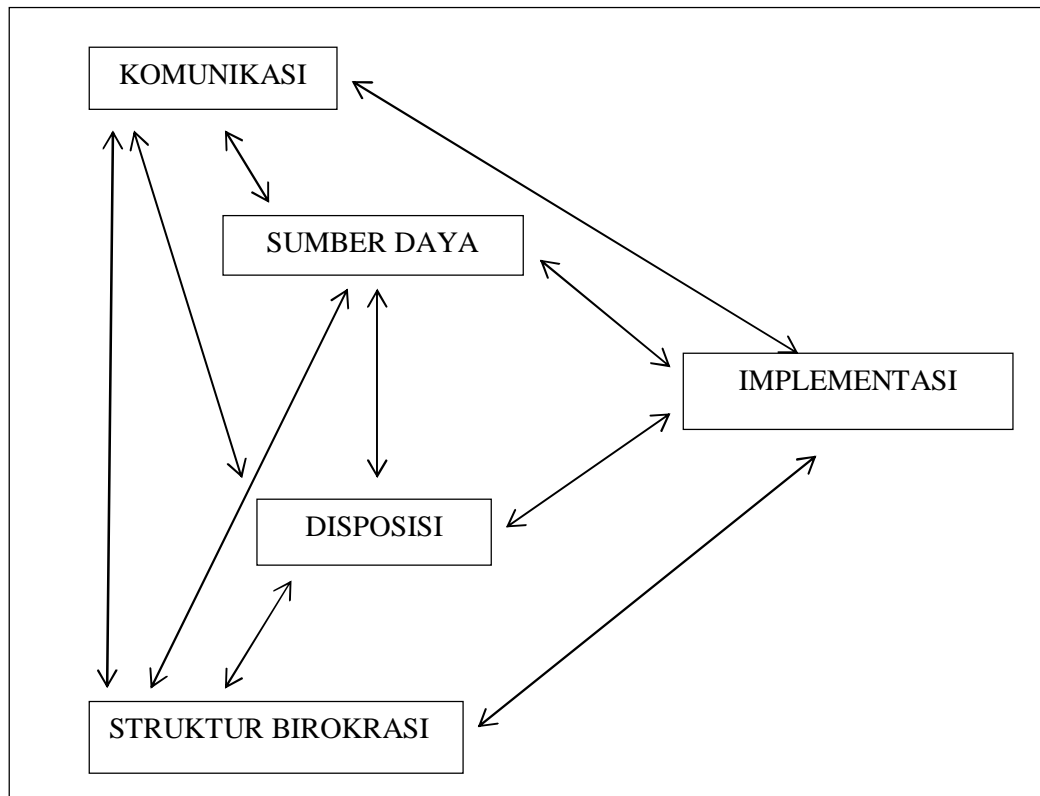
5. *Methods (Legitimate)*, keabsahan atau legitimasi suatu kebijakan juga sangat penting. Dalam manajemen publik dikenal dengan persetujuan atasan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. *Market (Participation)*, partisipasi dapat berbentuk dukungan dapat pula berupa penolakan.

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan *Edward* dalam Indiahono (2009: 31), menunjuk pada empat variable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.
2. Sumber daya, yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya *financial*. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan immenjadi kurang energik dan berjalan lamban. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan

financial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan.

3. Disposisi, yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/ program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam *guideline* program/ kebijakan. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/ kebijakan.
4. Struktur birokrasi, menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedure* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.



Gambar 2.1 Model Implementasi Edward III

B. Konsep Mutu Layanan Pendidikan

Menurut Nima Lestari (2011: 23) mutu atau yang sering disebut dengan kualitas dapat diartikan sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan serta kebutuhan pelanggan. Menurut Yoyon Bahtiar Irianto (2012: 119), dimaksud standar mutu adalah paduan sifat-sifat barang atau jasa yang relatif mantap dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dalam arti yang luas (lokal, nasional, dan internasional). Sedangkan menurut Edward Sallis (2010: 54), bahwa definisi mutu memiliki dua aspek, yaitu: (1) menyesuaikan diri dengan spesifikasi, dan (2) memenuhi kebutuhan pelanggan.

Berdasarkan uraian di atas, mutu dapat disimpulkan sebagai suatu karakteristik nilai yang dimiliki oleh sebuah produk atau layanan jasa yang menjadi standar kepuasan pelanggannya. Karakteristik mutu suatu produk/layanan jasa berbeda antara yang satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan produk yang dihasilkan atau layanan jasa yang ditawarkan.

Menurut Moh. Said (2011: 5), pendidikan adalah suatu proses untuk mendewasakan manusia. Dengan kata lain, pendidikan merupakan suatu upaya secara sengaja dan terarah untuk memanusiakan manusia. Melalui pendidikan manusia dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sempurna sehingga ia dapat melaksanakan tugas sebagai manusia serta memelihara sekelilingnya secara baik dan bermanfaat. Sedangkan menurut Sudarwan Danim (2013: 2), pendidikan adalah proses membimbing, melatih, dan memandu manusia terhindar atau keluar dari kebodohan dan pembodohan.

Menurut Jalaluddin dan Abdullah (2016: 9), pendidikan diartikan sebagai suatu proses usaha dari manusia dewasa yang telah sadar akan kemanusiaannya dalam membimbing, melatih, mengajar, dan menanamkan nilai-nilai dan dasar-dasar pandangan hidup kepada generasi muda, agar nantinya menjadi manusia yang sadar dan bertanggung jawab akan tugas-tugas hidupnya sebagai manusia, sesuai dengan sifat hakiki dan ciri-ciri kemanusiaannya. Menurut Sir Doldfrey Thomson dalam Fattah (2016: 39), pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan yang tetap (permanen) didalam kebiasaan-kebiasaan tingkah lakunya, pikirannya, dan sikapnya.

Dari uraian di atas, maka pendidikan dapat diartikan sebagai:

- 1) Suatu proses pertumbuhan yang menyesuaikan dengan lingkungan;
- 2) Suatu pengarahan dan bimbingan yang diberikan kepada anak dalam pertumbuhannya;
- 3) Suatu usaha sadar untuk menciptakan suatu keadaan atau situasi tertentu yang dikehendaki oleh masyarakat;
- 4) Suatu pembentukan kepribadian dan kemampuan anak dalam menuju kedewasaan.

Tilaar (2002: 79), menyatakan hakikat pendidikan adalah pendidikan merupakan suatu proses mendidik, yaitu suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, sehingga akan menimbulkan perubahan dalam dirinya. Mencermati pernyataan dari Tilaar tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa dalam proses pendidikan, ada proses belajar dan pembelajaran, sehingga dalam pendidikan jelas terjadi proses pembentukan manusia yang lebih manusia. Proses mendidik dan dididik merupakan perbuatan yang bersifat mendasar (fundamental), karena di dalamnya terjadi proses dan perbuatan yang mengubah serta menentukan jalan hidup manusia. Muhammad Saroni (2011: 10), pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung dalam kehidupan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kondisi dalam diri dengan kondisi luar diri. Proses penyeimbangan ini merupakan bentuk *survive* yang dilakukan agar diri dapat mengikuti setiap kegiatan yang berlangsung dalam kehidupan.

Beberapa konsep pendidikan yang telah dipaparkan tersebut meskipun terlihat berbeda, namun sebenarnya memiliki kesamaan dimana di dalamnya terdapat kesatuan unsur-unsur yaitu: pendidikan merupakan suatu proses, ada hubungan antara pendidik dan peserta didik, serta memiliki tujuan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditegaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses reorganisasi dan rekonstruksi (penyusunan kembali) pengalaman yang bertujuan menambah efisiensi individu dalam interaksinya dengan lingkungan.

Amri (2013: 18) mengatakan dalam pendidikan bukanlah barang akan tetapi layanan, dimana mutu harus dapat memenuhi kebutuhan, harapan dan keinginan semua pihak/pemakai dengan fokus utamanya terletak pada peserta didik. Mutu pendidikan berkembang seiring dengan tuntutan kebutuhan hasil pendidikan yang berkaitan dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang melekat pada wujud pengembangan kualitas pengembangan sumberdaya manusia. Sedangkan menurut Diding Nurdin dan Imam Sibaweh (2015: 30), mutu pendidikan mencakup mutu *output*, mutu proses, dan mutu *input*. *Output* pendidikan yang bermutu ditentukan oleh proses pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu dipengaruhi oleh *input* yang mencakup sumber guru, siswa, anggaran, fasilitas, dan orangtua siswa. Sumber daya yang tersedia tersebut diharapkan dapat menunjang keberhasilan tujuan pendidikan dan dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, mutu pendidikan dapat disimpulkan sebagai suatu nilai dan karakteristik pendidikan yang dapat memuaskan pelanggan dalam bidang pendidikan yaitu siswa, orang tua dan masyarakat. Mutu pendidikan

meliputi aspek *input* pendidikan, proses pendidikan dan *output* sebagai hasil dari proses pendidikan.

Menurut Brata (2003: 9), suatu pelayanan akan terbentuk karena adanya proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan kepada pihak yang dilayani. Brata juga menambahkan bahwa suatu layanan dapat terjadi antara seseorang dengan seseorang, seseorang dengan kelompok, ataupun kelompok dengan seseorang, seperti halnya orang-orang yang berada dalam sebuah organisasi. Menurut Mahmud (2012: 63-65), secara garis besar terdapat 5 layanan pendidikan, yaitu:

a. Layanan informasi.

Layanan informasi diberikan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Informasi lisan dapat diperoleh melalui kontak langsung secara tatap muka, sedangkan informasi tertulis dapat diberikan melalui berbagai buku pedoman seperti : brosur, spanduk, pamflet, papan pengumuman, situs website dan lain-lain.

b. Layanan sarana prasarana.

Layanan sarana prasarana merupakan pemberian layanan dalam bentuk penyediaan sarana prasarana atau fasilitas fisik seperti: gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium dan lain-lain.

c. Layanan administrasi.

Layanan administrasi meliputi pembayaran SPP dan pembuatan surat keterangan dan sebagainya.

d. Layanan bimbingan.

Layanan bimbingan diawali dengan program orientasi sekolah, bimbingan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan khususnya kesulitan belajar dan juga masalah-masalah pribadi, bimbingan pendidikan dan pengajaran (KBM), dan bimbingan praktik keilmuan.

e. Layanan pengembangan bakat dan minat serta keterampilan.

Layanan pengembangan bakat dan minat serta keterampilan dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa.

f. Layanan kesejahteraan.

Di antara bentuk pelayanan kesejahteraan kepada siswa adalah pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi khususnya kalangan kurang mampu serta pemberian keringanan SPP.

Menurut Sartika (2002:8), Kualitas pada dasarnya dapat berupa kemampuan, barang, dan pelayanan, kualitas pendidikan dapat menunjuk kepada kualitas proses dan kualitas hasil (produk). Suatu pendidikan dapat bermutu dari segi proses yang sudah barang tentu amat dipengaruhi kualitas masukannya jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif dan peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna (*meaningful learning*) dan juga memperoleh pengetahuan yang berguna baik bagi dirinya maupun bagi orang lain (*functional knowledge*) yang ditunjang secara wajar oleh sumber daya (manusia, dana, sarana dan prasarana).

Jadi berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mutu pelayanan pendidikan adalah adanya jaminan proses atau layanan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan dan mampu memenuhi keinginan para siswa, masyarakat (kepuasan pelanggan).

C. Konsep Komite Sekolah

Menurut Oemar Hamalik (2009: 6), Sekolah adalah suatu lembaga profesional. Sekolah bertujuan membentuk anak didik menjadi manusia dewasa yang berkepribadian matang dan tangguh, yang dapat dipertanggungjawabkan dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan terhadap dirinya. Sedangkan menurut Ade Irawan (2004: 42), sekolah adalah sebuah tempat dimana terjadi proses belajar mengajar serta tempat memberi dan menerima pelajaran menurut tingkatannya masing-masing. Komite sekolah merupakan institusi yang dimunculkan untuk menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Karena dijadikan wadah yang representatif, kemunculan komite sekolah diharapkan bisa mewujudkan peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.

Menurut Tim Prima Pena (2006: 256) menjelaskan Komite Sekolah berasal dari dua kata yaitu „Komite dan Sekolah . Dalam Kamus Ilmiah Populer Komite adalah, badan, dewan, panitia. Berarti komite adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Sedangkan menurut Diding Nurdin dan Imam Sibaweh (2015: 30), komite sekolah atau madrasah merupakan partner dari kepala sekolah atau madrasah sebagai wujud dari kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk membantu kepala sekolah/madrasah baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun program-program pendidikan.

Menurut Nanang Fattah (2004: 118), komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non politis dan non profit, yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholders* pendidikan ditingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Adapun tujuan komite sekolah menurut Hasbullah, (2006: 90), yaitu 1). mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; 2). meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan 3). menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan yang bermutu di satuan pendidikan.

Dengan demikian, komite sekolah adalah badan mandiri yang mmewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, efisiensi pengelolaan pendidikan disuatu pendidikan, baik pada penddidikan persekolahan, jalurr pendidikan sekolah, maupun luar sekolah. Nama dan ruang lingkup wadah ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan seperti komite sekolah, manajemen madrasah, komite pendidikan luar sekolah, dewan sekolah, manajemen sekolah, manajemen msdrasah, komite tk, atau nama lain yang sesuai dengan kriteria pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan seolah dengan fokus pemenuhan kebutuhan kompetitif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan cara penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2009: 72), penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peristiwa yang tengah berlangsung pada saat di lapangan. Sedangkan menurut Norman K Denzin & Yvonna S Lincoln (Eds) (2009: 2), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mempelajari benda-benda maupun kegiatan di lapangan yang terjadi dalam konteks alamiah dan peneliti berupaya untuk memahami makna dan menafsirkan fenomena yang terjadi selama di lapangan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang akan diteliti atau data yang akan diperoleh dengan cara wawancara dengan informasi yang telah ditentukan.

2. Data sekunder

Melalui studi kepustakaan peneliti menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari buku dan referensi buku, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

C. Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak: kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

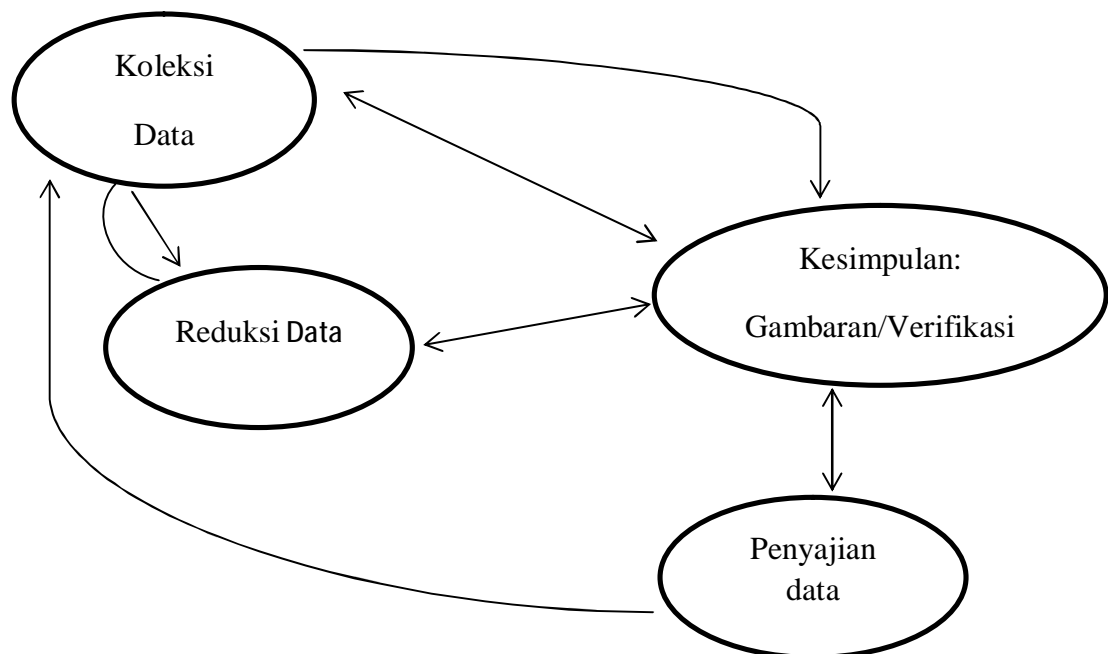
Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan suatu perundangan, peraturan dari suatu program pemerintah guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu didalam tatanan hidup masyarakat.
2. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, efisiensi pengelolaan pendidikan disuatu pendidikan, baik pada penddidikan persekolahan, jalurr pendidikan sekolah, maupun luar sekolah.

3. Mutu layanan pendidikan dapat sebagai suatu nilai dan karakteristik pendidikan yang dapat memuaskan pelanggan dalam bidang pendidikan yaitu siswa, orang tua dan masyarakat.

D. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiono (2012:337-338) menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi data. Model yang digunakan dalam teknik analisis data penelitian ini adalah model interaktif. Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar berikut ini:



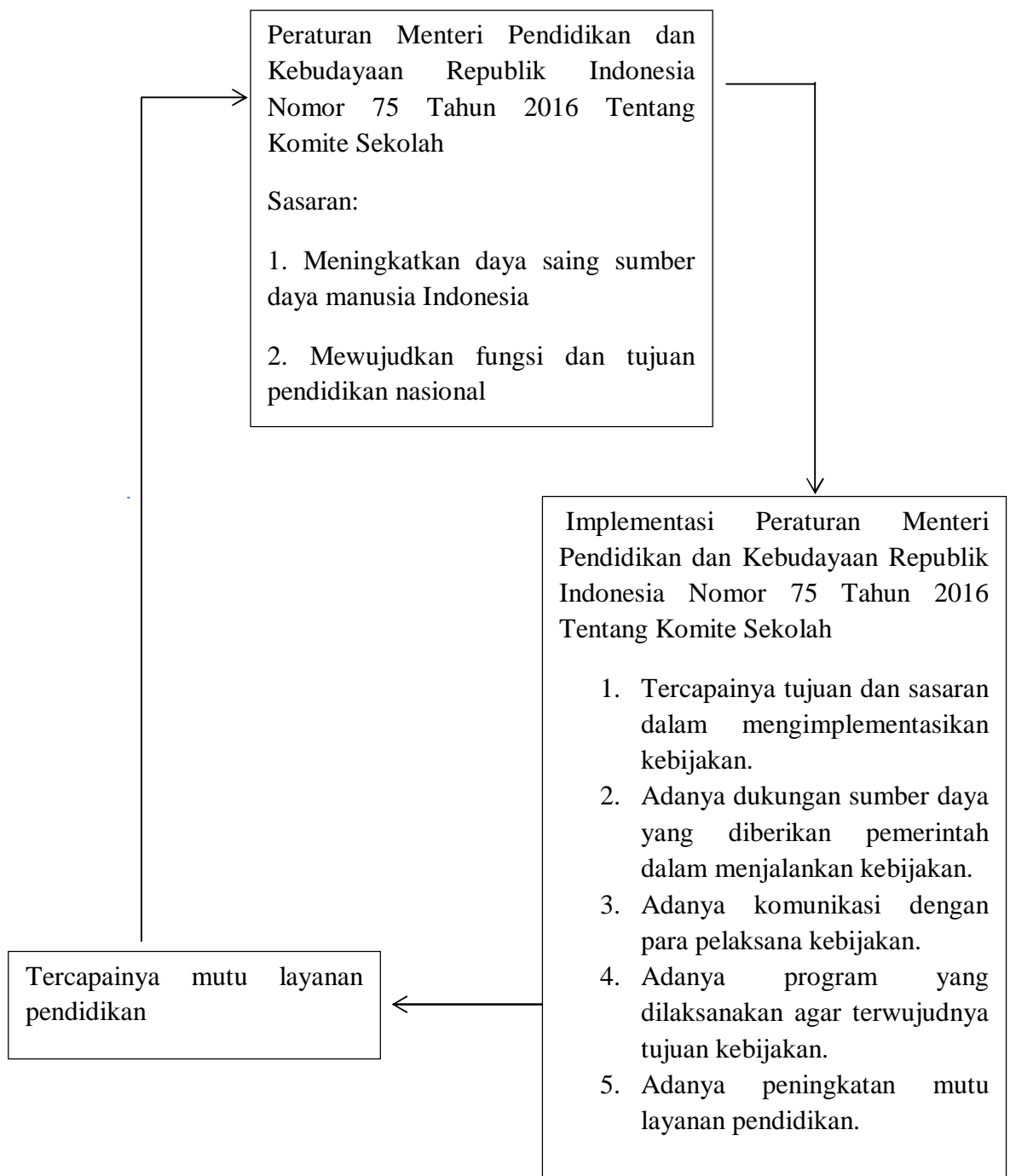
Gambar 3.1

Komponen dalam analisis data (model interaktif)

E. Kerangka Konsep

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.2 Kerangka Konsep



F. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui untuk analisa dari variable tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 dengan indikator seperti komite memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan program sekolah, dan komite sekolah mengawasi pelayanan pendidikan disekolah.
2. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan dalam menjalankan kebijakan, dengan indikator seperti dukungan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas maupun informasi dan wewenang. Contoh: penggalangan dana dan memberikan dukungan fasilitas untuk memperindah sekolah/kelas anak.
3. Adanya komunikasi dengan para pelaksana kebijakan, dengan indikator seperti adanya musyawarah dari pihak sekolah bersama komite sekolah. Contoh: mengadakan rapat dan pertemuan informal antara para pejabat.

4. Adanya program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016, dengan indikator seperti adanya program Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana. Contoh: Pemenuhan sarana dan prasarana minimal, dan pemenuhan fasilitas pembelajaran dan penilaian.
5. Adanya peningkatan mutu layanan pendidikan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016, dengan indikator seperti adanya pengawasan layanan pendidikan dalam sekolah. Contoh: pengawasan komite pada layanan pendidikan di sekolah.

G. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian lokasi atau objek penelitian adalah sangat penting karena dijadikan sebagai suatu tempat untuk pengambilan data. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Desa Bonda Kase. Waktu Penelitian direncanakan dari bulan Januari 2018 s.d Maret 2018.

H. Narasumber

Narasumber dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Narasumber dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Natal

Nama : Idwar, S.Pd

Umur : 36 tahun

Jabatan : Kepala Sekolah

Pendidikan : S.1

2. Ketua Komite SMP Negeri 6 Natal

Nama : Raden

Umur : 38 tahun

Jabatan : Ketua Komite

Pendidikan : SMA

3. Guru SMP Negeri 6 Natal

Nama : Sri Guswinda, S.Pd

Umur : 26 tahun

Jabatan : Guru kelas

Pendidikan : S.1

4. Guru SMP Negeri 6 Natal

Nama : Muhammad Ridho Siregar S.Pd

Umur : 34 tahun

Jabatan : Guru kelas

Pendidikan : S.1

5. Guru SMP Negeri 6 Natal

Nama : Ermi, S.Pd

Umur : 30 tahun

Jabatan : Guru kelas

Pendidikan : S.1

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat SMP Negeri 6 Natal

Hampir sebahagian besar orang tua berusaha mencari lembaga pendidikan yang kondusif terhadap anaknya. Hal ini dilakukan karena pendidikan anak pada tingkat menengah penting dalam proses perjalanan masa depan yang akan dijalani anak yang mampu menjawab segala tantangan zaman dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang akan datang. Namun pencarian lembaga pendidikan tersebut, orang tua diharapkan dapat mempelajari dan melihat langsung keberadaan sekolah tersebut. Baik dari segi sarana, fasilitas, tujuan, kurikulum maupun tenaga pengajarnya.

SMP Negeri 6 Natal yang berada di jalan Lintas Natal Desa Bonda Kase berdiri pada tanggal 12 Juli 2008. Pada tahun awal berdirinya siswa SMP Negeri 6 Natal masih sedikit. Tahap demi tahap sekolah menjalani perubahan pembangunan sarana prasana dari segi fisik terus mengalami peningkatan yang akan menunjang kemajuan mutu pendidikan sesuai standar. Fasilitas sekolah yang kini hampir seluruhnya terpenuhi. Adapun status SMP Negeri 6 Natal dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.1**Status SMP Negeri 6 Natal**

Kepemilikan	Pemerintah
No. Statistik Sekolah	1040761011029
Akreditasi	B

Sumber: SMP Negeri 6 Natal 2017/2018

Tabel 3.2

**Pihak pengajar/ketenagaan sekolah menurut golongan di SMP Negeri 6
Natal**

Tenaga administrasi	2
Guru PNS	2
Guru non PNS	18

Sumber: SMP Negeri 6 Natal 2017/2018

2. Visi Misi dan Tujuan Sekolah

Visi

Terwujudnya siswa yang cerdas, terampil, percaya diri, beriman dan berakhlak mulia serta berguna bagi masyarakat dan negara.

Misi

1. Menciptakan suasana sekolah sebagai tempat anak didik merasa aman, nyaman dan senang seakan-akan berada dalam taman dan istana ilmu.

2. Mendidik siswa, berdisiplin tinggi dan taat pada agama
3. Menjadikan siswa lulusan SMP yang berkualitas dalam bidang ilmu dan keterampilan serta mampu bersaing pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

3. Tujuan Sekolah terdiri dari:

a. Tujuan Umum Pendidikan

Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

b. Tujuan Khusus Pendidikan SMP Negeri 6 Natal

1. Siswa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
2. Siswa mempunyai dasar-dasar pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. Mengetahui dan mencintai bangsa, masyarakat dan kebudayaannya.
4. Siswa kreatif, terampil dan bekerja keras untuk dapat mengembangkan diri secara terus-menerus.
5. Siswa sehat jasmani dan rohani.

4. Bagan Struktur Organisasi Sekolah

Pihak-pihak yang mengelola dalam suatu organisasi diatur sedemikian rupa dalam suatu struktur organisasi. Struktur merupakan hasil proses pengorganisasian. Struktur organisasi merupakan kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan-satuan organisasi individu-individu yang berada di dalam suatu organisasi. Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas bersama-sama secara harmonis.

Setiap organisasi baik yang besar maupun yang kecil harus mempunyai struktur organisasi yang baik dan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di organisasi tersebut. Struktur organisasi dibentuk menciptakan suatu pola yang dapat mempertinggi efektivitas kerja. Dari struktur organisasi ini akan jelas terlihat adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi, sehingga terdapat koordinasi diantara tiap-tiap bagian tersebut. Jadi, dengan adanya struktur organisasi yang baik dimungkinkan tiap-tiap orang bekerja dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan struktur organisasi, penulis melihat bahwa di SMP Negeri 6 Natal ini menetapkan bentuk struktur organisasi garis, yang menggambarkan hubungan antar bagian secara horizontal dan mencerminkan wewenang serta tanggung jawab secara vertikal. Oleh karena itu para bawahan mengenal seorang atasan dan pertanggungjawaban diberikan sesuai dengan instruksi atasannya.

Sehingga dalam hal ini mudah dilakukan pengawasan dan pengalihan wewenangan terhadap bawahan.

Struktur organisasi yang disusun dengan baik dan jelas akan mencerminkan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi digerakkan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan bagan organisasi juga dengan mudah dapat dilihat banyak organisasi, jenjang dari masing-masing bagian, garis komando dan informasi yang dihubungkan bagian organisasi tersebut.

Struktur organisasi penting mengingat pembentukan organisasi yang akan membantu melaksanakan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tegas antara suatu bagian dengan bagian lainnya, baik pada tingkat manajemen atau menengah maupun tingkat bawah. Struktur organisasi harus mempunyai struktur organisasi yang sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang akan dilakukan.

Struktur organisasi adalah merupakan suatu kerangka kegiatan organisasi yang menentukan dan memperjelas tentang pembagian tugas atau pekerjaan, pembagian wewenang dan tanggungjawab dalam suatu sistem komunikasi yang sesuai sehingga dapat mencapai suatu koordinasi yang baik.

Dengan adanya struktur organisasi yang memisahkan fungsi dengan jelas, maka dapat diperoleh keuntungan diantaranya:

- a. Menghindari terjadinya konflik dalam pelaksanaan kerja;

b. Adanya ketegasan dan tanggungjawab dari masing-masing aparat.

Berdasarkan dari ketentuan dan kesepakatan yang telah diputuskan maka terbentuklah bagian struktur susunan organisasi SMP Negeri 6 Natal secara hirarkis kepala sekolah, komite sekolah, tata usaha, unit perpustakaan, kelompok jabatan fungsional (guru) dan siswa.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sekolah

Tugas pokok dan fungsi kepala sekolah harus mengacu pada Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah, meliputi:

1. Perencanaan program, 2. Pelaksanaan rencana kerja, 3. Pengawasan dan evaluasi, 4. Kepemimpinan sekolah, 5. Sistem informasi sekolah.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, Pasal 12 ayat (4) menyatakan bahwa penilaian kinerja kepala sekolah meliputi:

- a. Usaha pengembangan sekolah/madrasah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah/madrasah;
- b. Peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama di bawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
- c. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah/madrasah.
 - 1) Perencanaan Program
 - a. Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi sekolah.
 - b. Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan misi sekolah.

- c. Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan tujuan sekolah.
 - d. Membuat Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
 - e. Membuat perencanaan program induksi.
- 2) Pelaksanaan Rencana Kerja
- a. Menyusun pedoman kerja;
 - b. Menyusun struktur organisasi sekolah;
 - c. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah per semester dan Tahunan;
 - d. Menyusun pengelolaan kesiswaan yang meliputi: a. melaksanakan penerimaan peserta didik baru; b. memberikan layanan konseling kepada peserta didik; c. melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler untuk para peserta didik; d. melakukan pembinaan prestasi unggulan; e. melakukan pelacakan terhadap alumni;
 - e. Menyusun KTSP, kalender pendidikan, dan kegiatan pembelajaran;
 - f. Mengelola pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. Mengelola sarana dan prasarana;
 - h. Membimbing guru pemula;
 - i. Mengelola keuangan dan pembiayaan;
 - j. Mengelola budaya dan lingkungan sekolah;
 - k. Memberdayakan peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah;
 - l. Melaksanakan program induksi.
- 3) Supervisi dan Evaluasi

- a. Melaksanakan program supervisi.
 - b. Melaksanakan Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pengembangan KTSP
 - d. Mengevaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.
 - e. Menyiapkan kelengkapan akreditasi sekolah.
- 4) Kepemimpinan Sekolah
- a. Menjabarkan visi ke dalam misi target mutu;
 - b. Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;
 - c. Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah/madrasah;
 - d. Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu;
 - e. Bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah/madrasah;
 - f. Melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah/madrasah. Dalam hal sekolah/madrasah swasta, pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan penyelenggara sekolah/madrasah;
 - g. Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - h. Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;
 - i. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;

- j. Bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;
- k. Melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah/madrasah;
- l. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- m. Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah/madrasah;
- n. Membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah/madrasah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan;
- o. Menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah/madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif;
- p. Menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah/madrasah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat;
- q. Memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab;
- r. Mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah sesuai dengan bidangnya;
- s. Merencanakan pelaksanaan Program Induksi Guru Pemula (PIGP) di sekolah/madrasah;

- t. Menyiapkan buku pendoman pelaksanaan program induksi di sekolah dan dokumen terkait seperti KTSP, silabus, peraturan dan tata tertib sekolah baik bagi guru maupun bagi siswa, prosedur-prosedur P3K, prosedur keamanan sekolah;
- u. Melakukan analisis kebutuhan guru pemula;
- v. Menunjuk pembimbing dari guru yang dianggap layak (profesional);
- w. Membuat surat keputusan pengangkatan guru menjadi pembimbing bagi guru pemula;
- x. Menjadi pembimbing, jika pada satuan pendidikan yang dipimpinnya tidak terdapat guru yang memenuhi kriteria sebagai pembimbing;
- y. Mengajukan pembimbing dari satuan pendidikan lain kepada dinas pendidikan terkait jika tidak memiliki pembimbing dan kepala sekolah/madrasah tidak dapat menjadi pembimbing;
- z. Memantau secara reguler proses pembimbingan dan perkembangan guru pemula;
 - aa. Memantau kinerja guru pembimbing dalam melakukan pembimbingan;
 - bb. Melakukan observasi kegiatan mengajar yang dilakukan guru pemula dan memberikan masukan untuk perbaikan;
 - cc. Memberi penilaian kinerja kepada guru pemula;
 - dd. Menyusun laporan hasil penilaian kinerja untuk disampaikan kepada kepala dinas pendidikan dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari pembimbing, pengawas sekolah/ madrasah, dan memberikan salinan laporan tersebut kepada guru pemula;

- ee. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- ff. Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah/madrasah;
- gg. Membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah/madrasah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan;
- hh. Menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah/madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif;
- ii. Menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah/madrasah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat;
- jj. Memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab;
- kk. Mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah sesuai dengan bidangnya.

5) Sistem Informasi Sekolah

- a. Menciptakan atmosfer akademik yang kondusif dengan membangun budaya sekolah untuk menciptakan suasana yang kompetitif bagi siswa, rasa tanggung jawab bagi guru dan karyawan, menimbulkan rasa nyaman dalam bekerja dan belajar, menumbuhkan kesadaran tentang arti penting kemajuan, dan menumbuhkan kedisiplinan tinggi;

- b. Melakukan penataan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi warga sekolah berbasis kinerja;
- c. Menjalinkan kerjasama dengan pihak lain;
- d. Didukung oleh penerapan tik dalam manajemen sekolah;
- e. Didukung oleh kepemimpinan/manajerial yang kuat, dan memiliki tingkat sustainabilitas tinggi;
- f. Penguatan eksistensi lembaga dengan melakukan sosialisasi kepada semua pihak untuk memberikan informasi dan pemahaman yang sama sehingga sekolah/madrasah memperoleh dukungan secara maksimal;
- g. Penguatan manajemen sekolah dengan melakukan restrukturisasi dan reorganisasi intern sekolah apabila dipandang perlu (tanpa mengubah atau bertentangan dengan peraturan yang ada) sebagai bentuk pengembangan dan pemberdayaan potensi sekolah;
- h. Melakukan penguatan kerjasama dengan membangun jaringan yang lebih luas dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri, yang dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman (MoU);
- i. Meminimalkan masalah yang timbul di sekolah melalui penguatan rasa kekeluargaan dan kebersamaan untuk memajukan sekolah;
- j. Melakukan penguatan input sekolah dengan melengkapi berbagai fasilitas (perangkat keras dan lunak) manajemen sekolah, agar implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis TIK lebih efektif.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Komite Sekolah

- a. Tujuan Dasar Pembentukan Komite Sekolah

Tujuan dasar pembentukan komite sekolah yaitu menjadi penghubung antara pihak sekolah dan orang tua siswa, tentang seluruh permasalahan dan informasi yang berkaitan dengan sekolah.

b. Fungsi Utama Komite Sekolah

1. Pengawasan terhadap jalannya kegiatan sekolah baik secara administrasi ataupun keuangan
2. Penghubungan yang baik antara pihak sekolah dan pihak orang tua siswa
3. Pendukung setiap kegiatan sekolah yang membutuhkan bantuan baik secara moral maupun materil.

c. Komite Secara organisasi adalah:

1. Dibentuk di satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan
2. Dapat berbeda strukturnya satu dengan yang lain namun ada acuan yang diharapkan sama, yaitu tentang peran dan fungsi.

d. Maksud pembentukan Komite Sekolah, maksud dibentuknya komite sekolah adalah:

1. Agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan
2. Komite Sekolah yang dibentuk dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat merupakan pengembang kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif.

e. Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada:

1. Pengguna (client model)

2. Berbagi kewenangan (power sharing and advocacy model)
 3. Kemitraan (partnership model)
 4. Difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan
- f. Tujuan pembentukan Komite Sekolah
1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
 2. Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
 3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

g. Peran Komite Sekolah

1. Pemberi pertimbangan (Advisory Agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
 2. Pendukung (Supporting Agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
 3. Pengontrol (Controlling Agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
 4. Mediator (Mediator Agency) antara pemerintah (Executive) dengan masyarakat di satuan pendidikan.
- h. Fungsi Komite sekolah adalah sebagai berikut:

1. Mendorong perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: a). kebijakan dan program pendidikan; b). rencana anggaran pendidikan dan belanja madrasah (RAPBM); c). Kriteria kinerja satuan pendidikan; d). criteria tenaga kependidikan; e). hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Tata Usaha Sekolah

Tata usaha sekolah adalah bagian dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan sistem administrasi dan informasi pendidikan di sekolah. Berdasarkan (permendiknas 24/2008) fungsi Kepala Tata Usaha Sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan administrasi program dan anggaran.
- b. Koordinator administrasi ketatausahaan
- c. Pengelola administrasi program
- d. Penyusun laporan program dan anggaran
- e. Pembina staff

Tugas tata usaha sebagai tenaga administrasi sekolah antara lain melaksanakan:

- a. Administrasi kepegawaian
- b. Administrasi keuangan
- c. Administrasi sarana dan prasarana
- d. Administrasi kehumasan
- e. Administrasi persuratan dan kearsipan
- f. Administrasi kesiswaan
- g. Administrasi layanan khusus
- h. Teknologi informasi dan komunikasi

4. Tugas Pokok dan Fungsi Guru

Guru merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendidikan, dimana guru memegang peranan yang sangat vital dalam penyelenggaraan pendidikan formal pada khususnya. Demi terselenggaranya pendidikan yang baik, guru sebagai bagian didalamnya dituntut untuk memiliki kualifikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah serta menguasai kompetensi pedagogik, profesionalisme, kepribadian dan sosial.

- a. Guru Sebagai Pendidik

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. Peran guru sebagai pendidik (nurturer) berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut seperti penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua, dan orang dewasa yang lain, moralitas tanggungjawab kemasyarakatan, pengetahuan dan keterampilan dasar, persiapan untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual. Oleh karena itu tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkat laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada.

b. Guru Sebagai Pengajar

Peranan guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai factor, seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika factor-faktor di atas dipenuhi, maka melalui pembelajaran peserta didik dapat belajar dengan baik. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalah.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran, yaitu: Membuat ilustrasi, Mendefinisikan, Menganalisis,

Mensintesis, Bertanya, Merespon, Mendengarkan, Menciptakan kepercayaan, Memberikan pandangan yang bervariasi, Menyediakan media untuk mengkaji materi standar, Menyesuaikan metode pembelajaran, Memberikan nada perasaan.

Agar pembelajaran memiliki kekuatan yang maksimal, guru-guru harus senantiasa berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat yang telah dimilikinya ketika mempelajari materi standar.

c. Guru Sebagai Pembimbing

Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan, yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreatifitas, moral dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks.

d. Guru Sebagai Pemimpin

Guru diharapkan mempunyai kepribadian dan ilmu pengetahuan. Guru menjadi pemimpin bagi peserta didiknya. Ia akan menjadi imam.

e. Guru Sebagai Pengelola Pembelajaran

Guru harus mampu menguasai berbagai metode pembelajaran. Selain itu, guru juga dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilan agar supaya pengetahuan dan keterampilan yang dirilikinya tidak ketinggalan jaman.

f. Guru Sebagai Model dan Teladan

Guru merupakan model atau teladan bagi para peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Terdapat kecenderungan yang besar untuk menganggap bahwa peran ini tidak mudah untuk ditentang, apalagi ditolak.

Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan guru akan mendapat sorotan peserta didik serta orang disekitar lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru: sikap dasar, bicara dan gaya bicara, kebiasaan bekerja, sikap melalui pengalaman dan kesalahan, pakaian, hubungan kemanusiaan, proses berfikir, perilaku neurotis, selera, keputusan, kesehatan, gaya hidup secara umum.

g. Sebagai Anggota Masyarakat

Peranan guru sebagai komunikator pembangunan masyarakat. Seorang guru diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan disegala bidang yang sedang dilakukan. Ia dapat mengembangkan kemampuannya pada bidang-bidang dikuasainya. Guru perlu juga memiliki kemampuan untuk berbaur dengan masyarakat melalui kemampuannya, antara lain melalui kegiatan olah raga, keagamaan dan kepemudaan. Keluwesan bergaul harus dimiliki, sebab kalau tidak pergaulannya akan menjadi kaku dan berakibat yang bersangkutan kurang bisa diterima oleh masyarakat.

h. Guru sebagai administrator

Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Guru akan dihadapkan pada berbagai tugas administrasi di sekolah. Oleh karena itu seorang guru dituntut bekerja secara administrasi teratur. Segala pelaksanaan dalam kaitannya proses belajar mengajar perlu diadministrasikan secara baik. Sebab administrasi yang dikerjakan seperti membuat rencana mengajar, mencatat hasil

belajar dan sebagainya merupakan dokumen yang berharga bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

i. Guru Sebagai Penasehat

Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik juga bagi orang tua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasehati orang.

Peserta didik senantiasa berhadapan dengan kebutuhan untuk membuat keputusan dan dalam prosesnya akan lari kepada gurunya. Agar guru dapat menyadari perannya sebagai orang kepercayaan dan penasihat secara lebih mendalam, ia harus memahami psikologi kepribadian dan ilmu kesehatan mental.

j. Guru Sebagai Pembaharu (Inovator)

Guru menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didik. Dalam hal ini, terdapat jurang yang dalam dan luas antara generasi yang satu dengan yang lain, demikian halnya pengalaman orang tua memiliki arti lebih banyak daripada nenek kita. Seorang peserta didik yang belajar sekarang, secara psikologis berada jauh dari pengalaman manusia yang harus dipahami, dicerna dan diwujudkan dalam pendidikan.

Tugas guru adalah menerjemahkan kebijakan dan pengalaman yang berharga ini kedalam istilah atau bahasa moderen yang akan diterima oleh peserta didik. Sebagai jembatan antara generasi tua dan generasi muda, yang juga penerjemah pengalaman, guru harus menjadi pribadi yang terdidik.

k. Guru Sebagai Pendorong Kreatifitas

Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreatifitas tersebut. Kreatifitas merupakan sesuatu yang bersifat universal dan merupakan cirri aspek dunia kehidupan di sekitar kita. Kreativitas ditandai oleh adanya kegiatan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan tidak dilakukan oleh seseorang atau adanya kecenderungan untuk menciptakan sesuatu.

Akibat dari fungsi ini, guru senantiasa berusaha untuk menemukan cara yang lebih baik dalam melayani peserta didik, sehingga peserta didik akan menilainya bahwa ia memang kreatif dan tidak melakukan sesuatu secara rutin saja. Kreativitas menunjukkan bahwa apa yang akan dikerjakan oleh guru sekarang lebih baik dari yang telah dikerjakan sebelumnya.

l. Guru Sebagai Emansipator

Dengan kecerdikannya, guru mampu memahami potensi peserta didik, menghormati setiap insan dan menyadari bahwa kebanyakan insan merupakan “budak” stagnasi kebudayaan. Guru mengetahui bahwa pengalaman, pengakuan dan dorongan seringkali membebaskan peserta didik dari “self image” yang tidak menyenangkan, kebodohan dan dari perasaan tertolak dan rendah diri. Guru telah melaksanakan peran sebagai emansipator ketika peserta didik yang dicampakkan secara moril dan mengalami berbagai kesulitan dibangkitkan kembali menjadi pribadi yang percaya diri.

m. Guru Sebagai Evaluator

Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variable

lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Teknik apapun yang dipilih, dalam penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, yang meliputi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut.

n. Guru Sebagai Kulminator

Guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir (kulminasi). Dengan rancangannya peserta didik akan melewati tahap kulminasi, suatu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Di sini peran kulminator terpadu dengan peran sebagai evaluator.

Guru sejatinya adalah seorang pribadi yang harus serba bisa dan serba tahu. Serta mampu mentransferkan kebiasaan dan pengetahuan pada muridnya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan dan potensi anak didik.

Begitu banyak peran yang harus diemban oleh seorang guru. Peran yang begitu berat dipikul di pundak guru hendaknya tidak menjadikan calon guru mundur dari tugas mulia tersebut. Peran-peran tersebut harus menjadi tantangan dan motivasi bagi calon guru. Dia harus menyadari bahwa di masyarakat harus ada yang menjalani peran guru. Bila tidak, maka suatu masyarakat tidak akan terbangun dengan utuh. Penuh ketimpangan dan akhirnya masyarakat tersebut bergerak menuju kehancuran.

5. Pengertian Siswa

Siswa atau anak didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar, dalam proses belajar-

mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Siswa akan menjadi faktor penentu, sehingga dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya.

a. Tugas dan kewajiban terhadap sekolah, yaitu:

- 1) Menaati tata tertib sekolah.
- 2) Membayar SPP dan segala sesuatu yang dibebankan sekolah kepadanya, sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Turut membina suasana sekolah yang aman, tertib dan tenteram, di mana suasana keagamaan menjadi dominan.
- 4) Menjaga nama baik sekolah di manapun ia berada dan menjadi “kebanggaan” baginya mendapat kesempatan belajar pada sekolah yang bersangkutan.

b. Tugas dan kewajiban terhadap kelas, yaitu:

- 1) Senantiasa menjaga kebersihan kelas dan lingkungannya.
- 2) Memelihara keamanan dan ketertiban kelas sehingga suasana belajar menjadi aman, tenteram dan nyaman.
- 3) Melakukan kerja sama yang baik dengan teman sekelasnya dalam berbagai urusan dan kepentingan kelas serta segala sesuatunya dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- 4) Memelihara dan mengembangkan semangat dan solidaritas, kesatuan dan kebanggaan, suasana keagamaan dalam kelas, sehingga memberi peluang

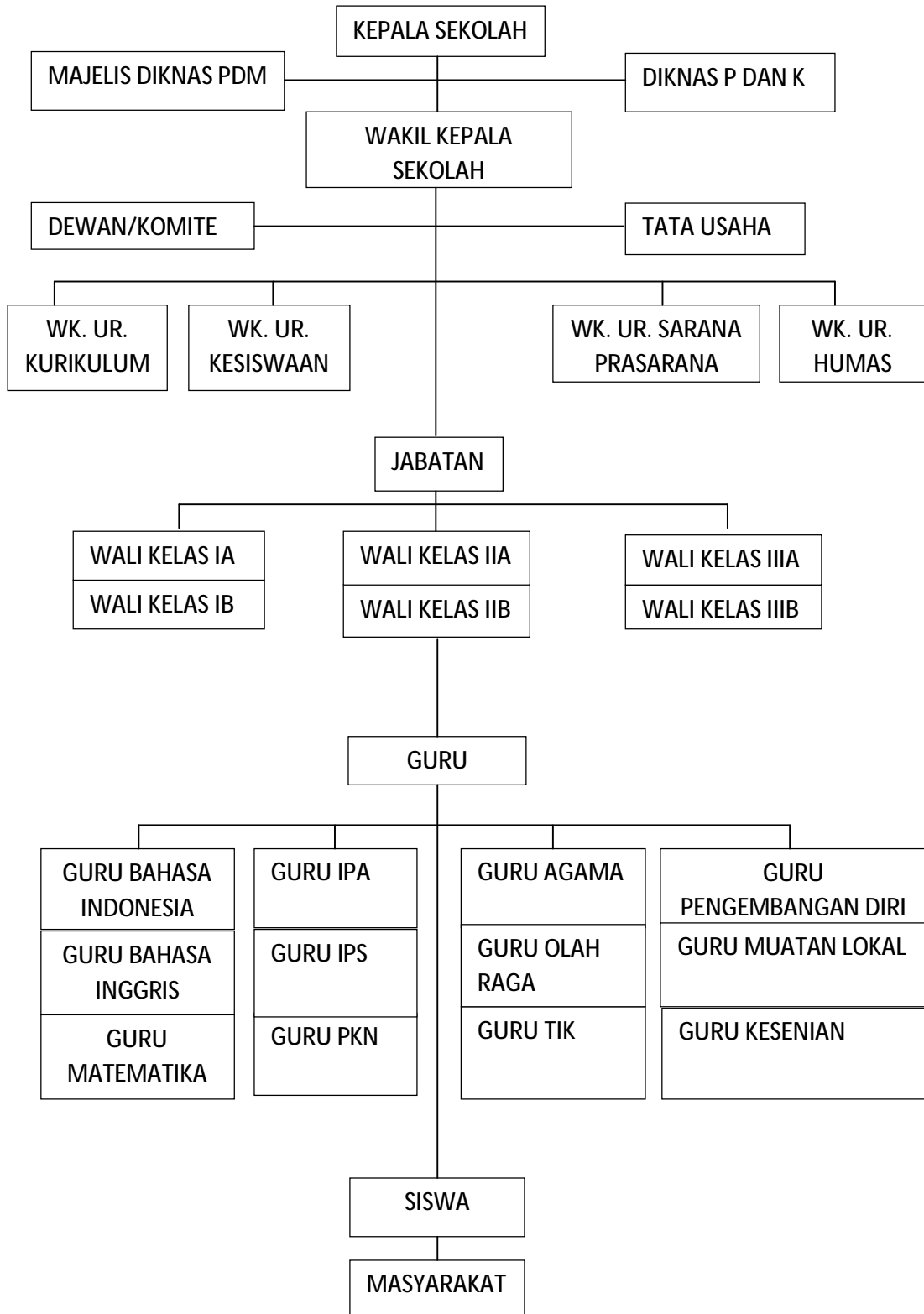
untuk mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam dan berlomba-lomba untuk kebaikan.

c. Tugas dan kewajiban terhadap kelompok, yaitu:

- 1) Membentuk kelompok belajar bersama untuk memperoleh berbagai pemahaman dan pengalaman dalam mempelajari bahan pelajaran melalui penelaahan dan diskusi kelompok.
- 2) Mengembangkan pola sikap keagamaan dan mempergunakan waktu senggang untuk belajar bersama, bersilaturahmi dengan keluarga dan anggota kelompoknya dan saling membantu, serta melakukan berbagai kegiatan yang bersifat rekreatif, sehingga terwujud rasa ukhwah Islamiah di antara mereka.
- 3) Memelihara semangat dan solidaritas kelompok, saling mempercayai dan saling menghargai akan kemampuan masing-masing anggota kelompok, sehingga belajar menjadi lebih terarah dan bermakna bagi diri masing-masing.

Gambar 3.3

Bagan Struktur Organisasi SMP Negeri 6 Natal



BAB IV

ANALISI DATA HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu: Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Natal, Komite Sekolah SMP Negeri 6 Natal, Guru Pengajar SMP Negeri 6 Natal.

Adapun kondisi narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.1

Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Frekuensi
1	Laki-laki	3
2	Perempuan	2
Jumlah		5

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi 3 orang.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Berdasarkan umur narasumber, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan umur 20-30 dan narasumber 30-40 tahun.

Tabel 4.2

Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	20-30	2
2	30-40	3
Jumlah		5

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berumur 30-40 tahun dengan frekuensi sebanyak 3 orang sedangkan sisanya berasal dari responden yang berumur 20-30 tahun sebanyak 2 orang.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan tingkat sarjana dan narasumber dengan tingkat pendidikan SMA. Pada tabel 4.3 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.3**Kondisi Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

No	Jenis Pendidikan	Frekuensi
1	S1	4
2	SMA	1
Jumlah		5

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari tingkat pendidikan sarjana dengan frekuensi sebanyak 4 orang, sedangkan sisanya berasal dari responden SMA sebanyak 1 orang.

1. Keadaan fisik/gambaran Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Natal

Data tentang keadaan fisik gambaran di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Natal adalah dikelompokkan dalam fasilitas sekolah, status sekolah, sarana sekolah, ketenagaan sekolah, dan data sekolah. Adapun Keadaan fisik gambaran di SMP negeri 6 Natal terkait fasilitas sekolah antara lain disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 4.4**Fasilitas yang ada di SMP Negeri 6 Natal**

Fasilitas Sekolah	Jumlah
Ruang Kelas Belajar	6
Labor Komputer	1

Perpustakaan	1
UKS	1
Ruang Guru	1
Aula	1
Kantin	1

Sumber: Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Natal

Adapun keadaan fisik gambaran di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Natal berdasarkan Sarana Sekolah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.5

Keadaan Sarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Natal

Sarana Sekolah	Jumlah
Laptop/Notebook	1
Komputer Kantor	2
Televisi	1
VCD/DVD Player	1
Komputer Labor	4

Sumber: Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Natal

Adapun data siswa yang terdapat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Natal berdasarkan kelas dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6**Data siswa berdasarkan kelas dan jenis kelamin**

Kelas	Perempuan	Laki-laki
1	18	14
2	25	16
3	19	10
Jumlah	62	40

Sumber: Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Natal

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa mayoritas siswa/siswi SMP Negeri 6 Natal adalah perempuan dengan jumlah 62 siswi.

2. Data Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di SMP Negeri 6 Natal penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

a. Tercapainya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2016

Tujuan dan sasaran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah ialah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Dimana Komite Sekolah menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 pukul 10.00 WIB dengan bapak Idwar, S.Pd selaku Kepala Sekolah di SMP N 6 Natal dalam kaitannya dengan cara Komite Sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan program sekolah, beliau mengatakan Komite Sekolah berperan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dengan melaksanakan tugas Komite Sekolah dalam memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan melalui musyawarah maupun pertemuan informal. Kemudian pengawasan Komite Sekolah dalam pelaksanaan program yang telah dijalankan pihak sekolah menurut beliau sudah efektif. Serta adapun kendala/hambatan di SMP Negeri 6 Natal ini dalam mencapai tujuan dan sasaran komite sekolah yang sering terjadi pada orang tua anak didik (siswa/i), dimana tidak semua orang tua anak didik (siswa/i) mempunyai pemahaman yang sama tentang pendidikan anaknya. Menurut beliau solusi dari kendala/hambatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Komite Sekolah dengan melakukan komunikasi antara Komite Sekolah dengan para orang tua anak didik tentang program-program yang dilaksanakan di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu 10 Februari 2018 pukul 15.00 WIB dengan bapak Raden selaku ketua Komite Sekolah di SMP Negeri 6 Natal dalam kaitannya dengan cara Komite Sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan program sekolah, beliau mengatakan Komite Sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan program sekolah melalui musyawarah dengan pihak sekolah orang tua anak didik (siswa/i) dan melalui pertemuan informal. Kemudian pengawasan Komite Sekolah dalam

pelaksanaan program yang telah dijalankan pihak sekolah menurut beliau sejauh ini sudah dilakukan dengan baik. Serta adapun kendala/hambatan di SMP Negeri 6 Natal ini dalam mencapai tujuan dan sasaran komite sekolah menurut beliau ada, solusi yang dapat dilakukan agar lebih mengkomunikasikan program-program sekolah kepada orang tua anak didik (siswa/i).

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB dengan ibu Sri Guswinda, S.Pd selaku guru di SMP Negeri 6 Natal dalam kaitannya dengan cara Komite Sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan program sekolah, beliau mengatakan Komite Sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan program sekolah melalui musyawarah dengan pihak sekolah orang tua anak didik (siswa/i) dan pertemuan informal. Kemudian pengawasan Komite Sekolah dalam pelaksanaan program yang telah dijalankan pihak sekolah menurut beliau sejauh ini sudah dilakukan dengan baik. Serta adapun kendala/hambatan di SMP Negeri 6 Natal ini dalam mencapai tujuan dan sasaran komite sekolah menurut beliau ada, solusi yang dapat dilakukan komite sekolah mampu berperan aktif terhadap perencanaan dan program-program komite secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 13 Februari 2018 pukul 10.00 WIB dengan bapak Muhammad Ridho Siregar S. Pd selaku guru di SMP Negeri 6 Natal dalam kaitannya dengan cara Komite Sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan program sekolah, beliau mengatakan Komite Sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan program sekolah melalui musyawarah dengan pihak sekolah orang

tua anak didik (siswa/i). Kemudian pengawasan Komite Sekolah dalam pelaksanaan program yang telah dijalankan pihak sekolah menurut beliau sejauh ini sudah dilakukan dengan baik. Serta adapun kendala/hambatan di SMP Negeri 6 Natal ini dalam mencapai tujuan dan sasaran komite sekolah menurut beliau ada, solusi yang dapat dilakukan perlu adanya strategi/pendekatan yang handal dalam memberdayakan masyarakat dalam menjalin komunikasi yang efektif dan efisien dalam mengimplementasikan berbagai program kerja sekolah dan program kerja komite sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 pukul 11.00 WIB dengan ibu Ermi S. Pd. Selaku guru di SMP Negeri 6 Natal dalam kaitannya dengan cara Komite Sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan program sekolah, beliau mengatakan Komite Sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan program sekolah melalui musyawarah dan melakukan pertemuan informal. Kemudian pengawasan Komite Sekolah dalam pelaksanaan program yang telah dijalankan pihak sekolah menurut beliau sejauh ini sudah dilakukan dengan baik. Serta adapun kendala/hambatan di SMP Negeri 6 Natal ini dalam mencapai tujuan dan sasaran komite sekolah menurut beliau ada, solusi yang dapat dilakukan Komite Sekolah menjalin komunikasi yang efektif kepada orang tua siswa.

b. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan dalam menjalankan kebijakan

Dukungan sumber daya yang diberikan dalam menjalankan kebijakan seperti sumber daya biaya karena setiap unit kerja selalu berhubungan dengan

keuangan, demikian pula sekolah. Komite sekolah juga ikut membantu mendukung sumberdaya melalui penggalangan dana bersama orangtua siswa/siswi maupun bersama masyarakat dan sekolah tentunya.

Berdasarkan hasil wawancara hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 pukul 10.00 WIB dengan bapak Idwar, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Natal beliau mengatakan Komite Sekolah memberikan dukungan fasilitas sekolah melalui penggalangan dana bersama orang tua anak didik (siswa/i). Kemudian komite sekolah melakukan penggalangan dana untuk fasilitas melalui musyawarah. Adapun kendala/hambatan Komite Sekolah dalam memberikan dukungan sumber daya di SMP Negeri 6 Natal menurut beliau ada, solusinya menurut beliau komite sekolah harus lebih aktif dalam musyawarah bersama orang tua anak didik (siswa/i).

Berdasarkan hasil wawancara hari Sabtu 10 Februari 2018 pukul 15.00 WIB dengan bapak Raden selaku ketua Komite Sekolah dalam kaitannya Komite Sekolah memberikan dukungan fasilitas sekolah di SMP Negeri 6 Natal beliau mengatakan komite sekolah memberikan dukungan fasilitas sekolah melalui penggalangan dana. Kemudian komite sekolah melakukan penggalangan dana untuk fasilitas sekolah melalui musyawarah. Adapun kendala/hambatan Komunikasi Sekolah dalam memberikan dukungan sumber daya di SMP Negeri 6 Natal menurut beliau ada, solusinya menurut beliau komite sekolah harus lebih aktif dalam musyawarah bersama orang tua anak didik (siswa/i).

Berdasarkan hasil wawancara hari Senin 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB dengan ibu Sri Guswinda S. Pd. dalam kaitannya Komite Sekolah memberikan dukungan fasilitas sekolah di SMP Negeri 6 Natal beliau mengatakan komite sekolah memberikan dukungan fasilitas sekolah melalui musyawarah untuk membicarakan langkah-langkah penggalangan dana. Kemudian komite sekolah melakukan penggalangan dana untuk fasilitas sekolah melalui musyawarah. Adapun kendala/hambatan Komunikasi Sekolah dalam memberikan dukungan sumber daya di SMP Negeri 6 Natal menurut beliau ada, solusinya menurut beliau Komite Sekolah lebih mengkomunikasikan masalah fasilitas sekolah kepada orang tua anak didik (siswa/i).

Berdasarkan hasil wawancara hari Selasa 13 Februari 2018 pukul 10.00 WIB dengan bapak Muhammad Ridho Siregar S. Pd. dalam kaitannya Komite Sekolah memberikan dukungan fasilitas sekolah di SMP Negeri 6 Natal beliau mengatakan komite sekolah memberikan dukungan fasilitas sekolah melalui penggalangan dana. Kemudian komite sekolah melakukan penggalangan dana untuk fasilitas sekolah melalui musyawarah. Adapun kendala/hambatan Komunikasi Sekolah dalam memberikan dukungan sumber daya di SMP Negeri 6 Natal menurut beliau ada, solusinya menurut beliau komite sekolah harus lebih aktif dalam musyawarah bersama orang tua anak didik (siswa/i).

Berdasarkan hasil wawancara hari Rabu 14 Februari 2018 pukul 10.00 WIB dengan ibu Sri Guswinda S. Pd. dalam kaitannya Komite Sekolah memberikan dukungan fasilitas sekolah di SMP Negeri 6 Natal beliau mengatakan komite sekolah memberikan dukungan fasilitas sekolah melalui penggalangan

dana. Kemudian komite sekolah melakukan penggalangan dana untuk fasilitas sekolah melalui musyawarah. Adapun kendala/hambatan Komunikasi Sekolah dalam memberikan dukungan sumber daya di SMP Negeri 6 Natal menurut beliau ada, solusinya menurut beliau Komite Sekolah lebih mengkomunikasikan masalah fasilitas sekolah kepada orang tua anak didik (siswa/i).

c. Adanya komunikasi dengan para pelaksana kebijakan

Komunikasi yang efektif diperlukan dalam pelaksanaan program sekolah. Tugas Komite Sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah ialah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah, dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, maupun masyarakat. Sehingga komunikasi yang efektif sangat diperlukan agar terwujudnya tujuan kebijakan. Komite Sekolah bersama Sekolah menjalin komunikasi melalui Rapat maupun pertemuan informal. Hal yang serupa dengan orang tua siswa maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 08 Februari 2018 dengan bapak Idwar S. Pd. Dalam kaitannya Dinas Pendidikan mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komunikasi Sekolah pada pihak sekolah, menurut beliau Dinas Pendidikan mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komunikasi Sekolah pada pihak sekolah melalui Rapat dengan guru-guru serta

pihak terkait. Kemudian pihak sekolah bermusyawarah dengan komite sekolah dengan mengundang komite sekolah untuk membicarakan permasalahan yang ada. Adapun pihak sekolah dan komite sekolah bekerjasama menurut beliau dalam urusan pelaksanaan program sekolah, fasilitas pendidikan di sekolah, serta pelayanan pendidikan sekolah. Menurut beliau komite sekolah komite sekolah berkomunikasi dengan orang tua siswa melalui musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu 10 Februari 2018 dengan bapak Raden selaku ketua komite sekolah dalam kaitannya Dinas Pendidikan mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komunikasi Sekolah pada pihak sekolah, menurut beliau Dinas Pendidikan mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komunikasi Sekolah pada pihak sekolah melalui Rapat dengan guru-guru serta pihak terkait. Kemudian pihak sekolah bermusyawarah dengan komite sekolah dengan mengundang komite sekolah untuk membicarakan permasalahan yang ada. Adapun pihak sekolah dan komite sekolah bekerjasama menurut beliau dalam urusan meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah. Menurut beliau komite sekolah komite sekolah berkomunikasi dengan orang tua siswa melalui musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 12 Februari 2018 dengan ibu Sri Guswinda S. Pd selaku guru di SMP Negeri 6 Natal dalam kaitannya Dinas Pendidikan mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komunikasi Sekolah pada pihak sekolah, menurut beliau Dinas Pendidikan mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komunikasi Sekolah pada pihak sekolah melalui Rapat dengan guru-guru serta pihak terkait. Kemudian pihak sekolah bermusyawarah dengan komite sekolah dengan mengundang komite sekolah untuk membicarakan permasalahan yang ada. Adapun pihak sekolah dan komite sekolah bekerjasama menurut beliau dalam urusan pelaksanaan program sekolah, fasilitas pendidikan di sekolah, serta pelayanan pendidikan sekolah. Menurut beliau komite sekolah berkomunikasi dengan orang tua siswa melalui musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 13 Februari 2018 dengan bapak Muhammad Ridho Siregar S. Pd selaku guru di SMP Negeri 6 Natal dalam kaitannya Dinas Pendidikan mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komunikasi Sekolah pada pihak sekolah, menurut beliau Dinas Pendidikan mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komunikasi Sekolah pada pihak sekolah melalui Rapat dengan pihak sekolah. Kemudian pihak sekolah bermusyawarah dengan komite sekolah dengan mengundang komite sekolah untuk membicarakan permasalahan yang ada. Adapun pihak sekolah dan komite sekolah bekerjasama menurut beliau dalam urusan pelaksanaan program sekolah, fasilitas pendidikan di sekolah, serta pelayanan pendidikan sekolah. Menurut beliau komite sekolah berkomunikasi dengan orang tua siswa melalui musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 14 Februari 2018 dengan ibu Ermi S. Pd selaku guru di SMP Negeri 6 Natal dalam kaitannya Dinas Pendidikan

mensosialisakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komunikasi Sekolah pada pihak sekolah, menurut beliau Dinas Pendidikan mensosialisakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komunikasi Sekolah pada pihak sekolah melalui Rapat dengan pihak sekolah. Kemudian pihak sekolah bermusyawarah dengan komite sekolah dengan mengundang komite sekolah untuk membicarakan permasalahan yang ada. Adapun pihak sekolah dan komite sekolah bekerjasama menurut beliau dalam urusan pelaksanaan program sekolah, fasilitas pendidikan di sekolah, serta pelayanan pendidikan sekolah. Menurut beliau komite sekolah berkomunikasi dengan orang tua siswa melalui musyawarah.

d. Adanya program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2018

Program perlu dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan kebijakan, baik itu program sekolah seperti pemenuhan fasilitas pembelajaran dan penilaian maupun program komite sekolah yaitu mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di SMP Negeri 6 Natal.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 08 Februari 2018 dengan bapak Idwar S. Pd. Selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 6 Natal dalam kaitannya Sikap dan tanggung jawab komite sekolah dalam membantu pelaksanaan program pemenuhan fasilitas pembelajaran dan penilaian di SMP Negeri 6 Natal , menurut beliau Sikap dan tanggung jawab komite sekolah dalam

membantu pelaksanaan program pemenuhan fasilitas pembelajaran dan penilaian di SMP Negeri 6 Natal sejauh ini sudah baik. Kemudian sikap dan tanggung jawab komite sekolah dalam membantu pelaksanaan program pemenuhan sarana dan prasana minimal di SMP Negeri 6 Natal menurut beliau sejauh ini sudah baik. Adapun kendala/hambatan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan menurut beliau sejauh ini belum ada.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu 10 Februari 2018 dengan bapak Raden selaku Ketua Komite di SMP Negeri 6 Natal dalam kaitannya Sikap dan tanggung jawab komite sekolah dalam membantu pelaksanaan program pemenuhan fasilitas pembelajaran dan penilaian di SMP Negeri 6 Natal , menurut beliau Sikap dan tanggung jawab komite sekolah dalam membantu pelaksanaan program pemenuhan fasilitas pembelajaran dan penilaian di SMP Negeri 6 Natal sejauh ini sudah baik. Kemudian sikap dan tanggung jawab komite sekolah dalam membantu pelaksanaan program pemenuhan sarana dan prasana minimal di SMP Negeri 6 Natal menurut beliau sejauh ini sudah baik. Adapun kendala/hambatan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan menurut beliau sejauh ini belum ada.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 12 Februari 2018 dengan ibu Sri Guswinda S. Pd. selaku guru sekolah di SMP Negeri 6 Natal dalam kaitannya Sikap dan tanggung jawab komite sekolah dalam membantu pelaksanaan program pemenuhan fasilitas pembelajaran dan penilaian di SMP Negeri 6 Natal, menurut beliau Sikap dan tanggung jawab komite sekolah dalam membantu pelaksanaan program pemenuhan fasilitas pembelajaran dan penilaian

di SMP Negeri 6 Natal sejauh ini sudah baik. Kemudian sikap dan tanggung jawab komite sekolah dalam membantu pelaksanaan program pemenuhan sarana dan prasana minimal di SMP Negeri 6 Natal menurut beliau sejauh ini sudah baik. Adapun kendala/hambatan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan menurut beliau sejauh ini belum ada.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 13 Februari 2018 dengan bapak Muhammad Ridho Siregar S. Pd. selaku guru sekolah di SMP Negeri 6 Natal dalam kaitannya Sikap dan tanggung jawab komite sekolah dalam membantu pelaksanaan program pemenuhan fasilitas pembelajaran dan penilaian di SMP Negeri 6 Natal, menurut beliau Sikap dan tanggung jawab komite sekolah dalam membantu pelaksanaan program pemenuhan fasilitas pembelajaran dan penilaian di SMP Negeri 6 Natal sejauh ini sudah baik. Kemudian sikap dan tanggung jawab komite sekolah dalam membantu pelaksanaan program pemenuhan sarana dan prasana minimal di SMP Negeri 6 Natal menurut beliau sejauh ini sudah baik. Adapun kendala/hambatan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan menurut beliau sejauh ini belum ada.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 14 Februari 2018 dengan bapak Ermi S. Pd. selaku guru sekolah di SMP Negeri 6 Natal dalam kaitannya Sikap dan tanggung jawab komite sekolah dalam membantu pelaksanaan program pemenuhan fasilitas pembelajaran dan penilaian di SMP Negeri 6 Natal, menurut beliau Sikap dan tanggung jawab komite sekolah dalam membantu pelaksanaan program pemenuhan fasilitas pembelajaran dan penilaian di SMP Negeri 6 Natal sejauh ini sudah baik. Kemudian sikap dan tanggung jawab komite sekolah dalam

membantu pelaksanaan program pemenuhan sarana dan prasana minimal di SMP Negeri 6 Natal menurut beliau sejauh ini sudah baik. Adapun kendala/hambatan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan menurut beliau sejauh ini belum ada.

e. Adanya peningkatan mutu layanan pendidikan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Dalam peningkatan mutu layanan pendidikan dalam pelaksanaan kebijakan, Komite Sekolah melaksanakan fungsinya dengan melakukan tugas Komite Sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yaitu memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah, dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis 08 Februari 2018 dengan bapak Idwar S. Pd. selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 6 Natal dalam kaitannya peningkatan mutu layanan pendidikan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 beliau mengatakan Komite Sekolah menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berkoordinasi dengan pihak sekolah. Menurut beliau pelaksanaan pengawasan komite sekolah untuk meningkatkan mutu

layanan pendidikan sekolah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMP Negeri 6 Natal Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, seperti memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan terkait kebijakan dan program sekolah, kinerja sekolah, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan fasilitas pendidikan di sekolah. Komite sekolah juga melakukan pengawasan dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Adapun kendala/hambatan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan menurut beliau sejauh ini belum ada.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu 10 Februari 2018 dengan bapak Raden selaku Ketua Komite Sekolah di SMP Negeri 6 Natal dalam kaitannya peningkatan mutu layanan pendidikan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 beliau mengatakan Komite Sekolah menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya harus sejalan dengan visi misi Kepala Sekolah. Menurut beliau pelaksanaan pengawasan komite sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan sekolah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMP Negeri 6 Natal Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsinya dengan maksimal, seperti memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan terkait kebijakan dan program sekolah, kinerja sekolah dan fasilitas pendidikan di sekolah. Komite sekolah juga melakukan pengawasan dalam

pelayanan pendidikan di sekolah. Adapun kendala/hambatan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan menurut beliau sejauh ini belum ada.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 11 Februari 2018 dengan ibu Sri Guswinda S. Pd. selaku Guru Sekolah di SMP Negeri 6 Natal dalam kaitannya peningkatan mutu layanan pendidikan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 beliau mengatakan Komite Sekolah menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang di ajukan oleh masyarakat maupun orang tua siswa. Menurut beliau pelaksanaan pengawasan komite sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan sekolah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMP Negeri 6 Natal Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, seperti memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan terkait kebijakan dan program sekolah, kinerja sekolah dan fasilitas pendidikan di sekolah. Komite sekolah juga melakukan pengawasan dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Adapun kendala/hambatan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan menurut beliau sejauh ini belum ada.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 13 Februari 2018 dengan bapak Muhammad Ridho Siregar S. Pd. selaku Guru Sekolah di SMP Negeri 6 Natal dalam kaitannya peningkatan mutu layanan pendidikan dalam pelaksanaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 beliau mengatakan Komite Sekolah menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berkoordinasi dengan pihak sekolah. Menurut beliau pelaksanaan pengawasan komite sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan sekolah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMP Negeri 6 Natal Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsinya seperti mengawasi keaktifan kinerja Kepala Sekolah dan guru-guru. Komite sekolah juga melakukan pengawasan dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Adapun kendala/hambatan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan menurut beliau sejauh ini belum ada.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 14 Februari 2018 dengan ibu Ermi S. Pd. selaku guru Sekolah SMP Negeri 6 Natal dalam kaitannya peningkatan mutu layanan pendidikan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 beliau mengatakan Komite Sekolah menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bekerjasama dengan pihak sekolah dan orang tua siswa. Menurut beliau pelaksanaan pengawasan komite sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan sekolah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMP Negeri 6 Natal Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Komite sekolah juga melakukan pengawasan dalam

pelayanan pendidikan di sekolah. Adapun kendala/hambatan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan menurut beliau sejauh ini belum ada.

B. Analisis Data

Berdasarkan uraian dalam penyajian data di atas, maka dalam pembahasan sub bab ini merupakan kajian atau analisis data dari hasil wawancara dengan para narasumber di SMP Negeri 6 Natal.

a. Tercapainya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2016

Terimplementasinya sebuah kebijakan adalah dengan terwujudnya tujuan dan sasaran kebijakan. Tujuan dan sasaran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah ialah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Dimana Komite Sekolah menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip gotong royong, demokratis, mandiri, professional, dan akuntabel.

Sesuai dengan yang dikemukakan Winarno (2012:102) Implementasi kebijakan publik yang merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah ataupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama bapak Raden selaku ketua Komite Sekolah di SMP Negeri 6 Natal dalam kaitannya dengan cara Komite Sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan program sekolah, beliau mengatakan Komite Sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan program sekolah melalui musyawarah dengan pihak sekolah orang tua anak didik (siswa/i) dan melalui pertemuan informal. Kemudian pengawasan Komite Sekolah dalam pelaksanaan program yang telah dijalankan pihak sekolah menurut beliau sejauh ini sudah dilakukan dengan baik. Serta adapun kendala/hambatan di SMP Negeri 6 Natal ini dalam mencapai tujuan dan sasaran komite sekolah menurut beliau ada, solusi yang dapat dilakukan yaitu pihak sekolah lebih mengkomunikasikan program-program sekolah kepada orang tua anak didik (siswa/i).

Dengan demikian tentang tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2016 sudah dapat dikatakan tercapai. Meskipun orang tua siswa kurang aktif dalam kerjasama dengan komite sekolah maupun pihak komite sekolah.

b. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi prabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan maka harus ada sumber daya pendukung dalam pencapaian Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Merilee S. Grindle dalam Nugroho (2006: 634), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*), serta kondisi sumberdaya, infrasutruktur perlu pemahaman yang komprehensif.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan pihak sekolah yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Natal beliau mengatakan komite sekolah bersama orang tua siswa membantu pembangunan sekolah seperti memperindah kelas, membuat taman sekolah, dan lainnya yang menunjang kegiatan belajar-mengajar. Diharapkan dari dukungan ini sekolah dapat menjalankan kebijakan ini secara bertahap, sehingga suatu hari nanti kebijakan yang diharapkan dapat berjalan dengan maksimal dan efektif.

Dengan demikian dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah sudah diberikan oleh pemerintah pada sekolah. Komite sekolah bersama orang tua siswa memberikan dukungan sumberdaya seperti dukungan fasilitas sekolah melalui penggalangan dana.

c. Adanya komunikasi dengan para pelaksana kebijakan

Komunikasi yang efektif diperlukan dalam pelaksanaan program sekolah. Tugas Komite Sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah ialah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah, dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, maupun masyarakat. Sehingga komunikasi yang efektif sangat diperlukan agar terwujudnya tujuan kebijakan. Komite Sekolah bersama Sekolah menjalin komunikasi melalui Rapat maupun pertemuan informal. Hal yang serupa dengan orang tua siswa maupun masyarakat.

Sesuai dengan model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan *Edward* dalam Indiahono (2009: 31), menunjuk pada empat variable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Komunikasi, yaitu menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan pihak sekolah yaitu Ketua Komite SMP Negeri 6 Natal beliau mengatakan komunikasi yang efektif diperlukan dalam pelaksanaan program sekolah maupun program komite sekolah. Menurut beliau masih ada kendala berkaitan dengan komunikasi dengan orang tua

murid, hal ini dianggap wajar karena kesibukan orang tua. Sehingga tidak semua orang tua siswa dapat mengikuti program-program yang dilaksanakan di sekolah.

Dengan demikian diharapkan adanya strategi/pendekatan dalam memberdayakan masyarakat dalam menjalin komunikasi yang efektif dan efisien dalam mengimplementasikan berbagai program kerja sekolah dan program kerja komite sekolah.

d. Adanya program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2018

Program perlu dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan kebijakan, baik itu program sekolah seperti pemenuhan fasilitas pembelajaran dan penilaian maupun program komite sekolah yaitu mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di SMP Negeri 6 Natal. Sesuai dengan Gordon dalam Pasolong (2008: 58) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Ketua Komite SMP Negeri 6 Natal beliau mengatakan agar terwujudnya tujuan kebijakan maka dibuat program tidak hanya pihak sekolah namun komite sekolah juga harus memiliki program. Menurut beliau program pemenuhan fasilitas pembelajaran dan

penilaian di SMP Negeri 6 Natal dan program pemenuhan sarana dan prasarana minimal di SMP Negeri 6 Natal sudah terlaksana dengan baik.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Idwar S. Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Natal beliau mengatakan bahwa suatu program terlaksana dengan baik bila ada kerjasama antara Pihak Sekolah, Komite Sekolah dan Orang tua siswa.

Dengan demikian agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah perlu dilaksanakan seperti pemenuhan fasilitas pembelajaran dan penilaian maupun program komite sekolah.

e. Adanya peningkatan mutu layanan pendidikan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016

Mutu layanan pendidikan adalah adanya jaminan proses atau layanan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mampu memenuhi keinginan para siswa dan masyarakat (kepuasan pelanggan). Menurut Sartika (2002:8), Kualitas pada dasarnya dapat berupa kemampuan, barang, dan pelayanan, kualitas pendidikan dapat menunjuk kepada kualitas proses dan kualitas hasil (produk). Suatu pendidikan dapat bermutu dari segi proses yang sudah barang tentu amat dipengaruhi kualitas masukannya jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif dan peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna (*meaningful learning*) dan juga memperoleh pengetahuan yang berguna baik bagi dirinya maupun bagi orang lain (*functional*

knowledge) yang ditunjang secara wajar oleh sumber daya (manusia, dana, sarana dan prasarana).

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah di SMP Negeri 6 Natal beliau mengatakan peningkatan mutu layanan pendidikan hanya akan terjadi apabila ada prinsip gotong royong, kerjasama antara Komite Sekolah, pihak sekolah, dan orang tua siswa. Menurut beliau pengawasan terhadap layanan pendidikan di Sekolah diperlukan agar pihak sekolah tetap disiplin dan konsisten dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada siswanya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Muhammad Ridho Siregar, S.Pd. selaku guru sekolah di SMP Negeri 6 Natal, beliau mengatakan bahwa Komite Sekolah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik misalnya memberikan pengawasan pada pelayanan pendidikan di sekolah, menyampaikan keluhan, kritik, saran dan aspirasi dari orang tua siswa dan masyarakat kepada pihak sekolah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Sekolah ini dapat mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di SMP Negeri 6 Natal.

Dengan demikian peningkatan mutu layanan pendidikan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, perlu dilaksanakan fungsi komite sekolah sesuai dengan kebijakan yang berlaku yaitu memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah, dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, maupun masyarakat.

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan disajikan serta dibahas dalam permasalahan terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMP Negeri 6 Natal, dalam pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah sudah berjalan dengan baik.

1. Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan ialah yang pertama tercapainya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Dalam tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan telah dilakukan oleh komite sekolah bersama orang tua siswa dan masyarakat serta pihak sekolah di SMP Negeri 6 Natal.
2. Kedua, adanya dukungan sumberdaya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan. Dalam hal ini komite sekolah bersama orang tua siswa memberikan dukungan sumberdaya seperti dukungan fasilitas sekolah melalui penggalangan dana.

3. Ketiga adanya komunikasi dengan para pelaksana kebijakan. Dalam hal ini komunikasi antara komite sekolah dan orang tua siswa kurang efektif, hal ini hal ini dianggap wajar karena kesibukan orang tua. Sehingga tidak semua orang tua siswa dapat mengikuti program-program yang dilaksanakan di sekolah.

4. Keempat, adanya program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016. Dalam hal ini, komite sekolah membantu program sekolah seperti pemenuhan fasilitas pembelajaran dan penilaian di sekolah dan membantu pelaksanaan program pemenuhan sarana dan prasarana minimal di sekolah. komite sekolah bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan program tersebut.

5. kelima, adanya peningkatan mutu layanan pendidikan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016. Dengan adanya komite sekolah yang melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif maka terjadi peningkatan mutu layanan pendidikan di SMP Negeri 6 Natal.

b. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Komite Sekolah di SMP Negeri 6 Natal mampu berperan aktif terhadap perencanaan dan program-program komite sekolah secara optimal dan komite sekolah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan mampu membantu pelaksanaan proses dan kegiatan pendidikan di sekolah.

2. Perlu adanya strategi/pendekatan yang handal dalam menjalin komunikasi yang efektif dan efisien dalam mengimplementasikan berbagai program kerja sekolah, memikirkan program atau kebijakan strategis dan tepat untuk peningkatan mutu pendidikan sekolah serta mampu menjalin koordinasi secara baik dengan pihak sekolah.

3. Terhadap Kepala Sekolah, Kepala Sekolah diharapkan perlu sosialisasi serta melibatkan komite sekolah dalam pengelolaan dan perumusan program sekolah secara maksimal, pihak sekolah harus dapat lebih mandiri dan kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. **Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**. Bumi Aksara, Jakarta.
- 2014: **Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik**. Edisi kedua, Revisi 2014. Bumi Aksara, Jakarta
- Abidin, Said Zainal. 2012: **Kebijakan Publik**. Salemba Humanika, Jakarta.
- Amri, Sofan. 2013: **Pengembangan & Model Pembelajaran dalam Kurikulum**. Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Barata, Atep Adya. 2003: **Dasar-dasar Pelayanan Prima**. Elex Media, Jakarta.
- Danim, Sudarwan. 2013: **Pengantar Kependidikan**. Alfabeta, Bandung.
- Fattah, Nanang. 2014: **Analisis Kebijakan Pendidikan**. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Hamalik, Oemar. 2009: **Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi**. Bumi Aksara, Jakarta.
- Indiahono, dwiyanto. 2009: **Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis**. Gava Media, Yogyakarta.
- Irianto, Yoyon Bahtiar. 2012: **Kebijakan Pembaharuan Pendidikan**. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Jalaluddin & Abdullah. 2014: **Filsafat Pendidikan**. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mahmud. 2012: **Sosiologi Pendidikan**. Pustaka Setia, Bandung.
- Mulyadi, Dedi. 2016: **Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik**. Alfabeta, Bandung
- Nurdin, Diding & Sibaweh, Imam. 2015: **Pengelolaan Pendidikan Dari Teori Menuju Implementasi**. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2008: **Teori Administrasi Publik**. Alfabeta, Bandung.
- Said, Mohammad. 2011: **Pendidikan Karakter di Sekolah**. Jaring Pena, Surabaya.

Tachjan. 2006. **Implementasi Kebijakan Publik**. Aipi Puslit KP2W Lemlit UNPAD. Bandung.

Taufiqurokhman. 2014: **Kebijakan Publik**. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), Jakarta Pusat.

Tilaar. 2002: **Membenahi Pendidikan Nasional**. Rineka Cipta, Jakarta.

Tim Prima Pena, 2006. **Kamus Ilmiah Populer**. Gitamedia Press, Surabaya.

Winarno, budi. 2002: **Kebijakan Public; Teori dan Proses**. Media Presindo, Yogyakarta.

----- 2008: **Kebijakan Publik; Teori dan Proses**. Edisi Revisi. PT Buku Kita, Jakarta.

Perundang-undangan

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.

Jurnal

Awie, A. Amirunyah, Idris, Adam & Hatuwe, Mass'ad. 2014: **Implementasi Kebijakan Peran Komite Sekolah Smk Negeri 5 Samarinda (Realisasi Kemendiknas Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah)**. 2 (4): 2144-2155 ISSN 2338-7637, ar.mian.fisip-unmul.ac.id.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Amriana
Tempat/tanggal Lahir : Kampung Sawah/ 02 Mei 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Rakyat Gg. Camar Sidorame Timur Medan Perjuangan
Anak ke : 6 dari 7 bersaudara
Nama Orang Tua
Nama Ayah : Amlan
Nama Ibu : Darsia
Alamat : Jl. Lintas Natal Desa Kampung Sawah Kecamatan Natal
Pendidikan :

1. Tahun 2002-2008 SD Negeri 147568 Kampung Sawah, Natal
2. Tahun 2008-2011 SMP Negeri 1 Natal
3. Tahun 2011-2014 MAN Natal
4. Tahun 2012 sampai dengan sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan dengan rasa tanggung jawab.

Penulis

Amriana

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Di SMP Negeri 6 Natal

Biodata Narasumber

Nama : Idwar, S.Pd

Umur : 36 tahun

Jabatan : Kepala Sekolah

Pendidikan : S.1

A. Tercapainya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014

1. Bagaimana komite sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan program sekolah disekolah ini?

Jawab: Komite Sekolah berperan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dengan melaksanakan tugas Komite Sekolah dalam memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan melalui musyawarah maupun pertemuan informal.

2. Bagaimana pengawasan komite sekolah dalam pelaksanaan program yang telah dijalankan pihak sekolah di sekolah ini?

Jawab: sejauh ini pengawasan komite sekolah dalam pelaksanaan program yang telah dijalankan pihak sekolah sudah efektif

3. Apakah ada kendala/hambatan dalam mencapai tujuan dan sasaran komite sekolah? Jika ada, apa solusi yang dapat dilakukan?

Jawab: Dalam mencapai tujuan dan sasaran komite sekolah yang sering terjadi pada orang tua anak didik, dimana tidak semua orang tua anak didik (siswa/i) mempunyai pemahaman yang sama tentang pendidikan anaknya.

Solusi dari kendala/hambatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Komite Sekolah dengan melakukan komunikasi antara Komite Sekolah dengan para orang tua anak didik tentang program-program yang dilaksanakan di sekolah.

B. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan

1. Bagaimana komite sekolah memberikan dukungan fasilitas sekolah di sekolah ini?

Jawab: penggalangan dana bersama orang tua anak didik (siswa/i). kemudian komite sekolah melakukan penggalangan dana untuk fasilitas melalui musyawarah.

2. Bagaimana komite sekolah melakukan penggalangan dana untuk fasilitas sekolah di sekolah ini?

Jawab: melalui musyawarah bersama orang tua/wali siswa serta masyarakat di desa ini.

3. Apakah ada kendala/hambatan komite sekolah dalam memberikan dukungan sumber daya di sekolah ini?

Jawab: ada, solusinya menurut beliau komite sekolah harus lebih aktif dalam musyawarah bersama orang tua anak didik.

C. Adanya komunikasi dengan para pelaksana kebijakan

1. Bagaimana dinas pendidikan mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah pada pihak sekolah?

Jawab: Dinas Pendidikan mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komunikasi Sekolah pada pihak sekolah melalui Rapat dengan guru-guru serta pihak terkait.

2. Bagaimana pihak sekolah bermusyawarah dengan komite sekolah?

Jawab: dengan mengundang komite sekolah untuk membicarakan permasalahan yang ada.

3. Dalam urusan apa saja pihak sekolah dan komite sekolah bekerjasama?

Jawab: dalam urusan pelaksanaan program sekolah, fasilitas pendidikan di sekolah, serta pelayanan pendidikan sekolah.

4. Bagaimana komite sekolah berkomunikasi dengan orang tua siswa?

Jawab: musyawarah

D. Adanya program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016

1. Bagaimana sikap dan tanggung jawab komite sekolah dalam membantu pelaksanaan program pemenuhan fasilitas pembelajaran dan penilaian di sekolah ini?

Jawab: sejauh ini sudah baik

2. Bagaimana sikap dan tanggung jawab komite sekolah dalam membantu pelaksanaan program pemenuhan sarana dan prasarana minimal di sekolah ini?

Jawab: sejauh ini sudah baik

3. Apakah ada kendala/hambatan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan? Jika ada bagaimana cara mengatasinya?

Jawab: sejauh ini belum ada.

E. Adanya peningkatan mutu layanan pendidikan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016

1. Bagaimana komite sekolah menjalankan tugas dan fungsinya agar sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan yang telah ditetapkan?

Jawab: dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berkoordinasi dengan pihak sekolah.

2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan komite sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan sekolah di sekolah ini?

Jawab: pelaksanaan pengawasan komite sekolah untuk meningkatkan mutu

layanan pendidikan sekolah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Apa saja yang sudah dilakukan komite sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah ini?

Jawab: Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, seperti memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan terkait kebijakan dan program sekolah, kinerja sekolah, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan fasilitas pendidikan di sekolah. Komite sekolah juga melakukan pengawasan dalam pelayanan pendidikan di sekolah.

4. Apakah ada kendala/hambatan komite sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah ini? Jika ada, apa solusi yang dapat dilakukan?

Jawab: sejauh ini belum ada

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Di SMP Negeri 6 Natal

Biodata Narasumber

Nama : Raden

Umur : 38 tahun

Jabatan : Ketua Komite

Pendidikan : SMA

A. Tercapainya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014

1. Bagaimana komite sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan program sekolah disekolah ini?

Jawab: melalui musyawarah dengan pihak sekolah orang tua anak didik (siswa/i) dan melauai pertemuan informal.

2. Bagaimana pengawasan komite sekolah dalam pelaksanaan program yang telah dijalankan pihak sekolah di sekolah ini?

Jawab: sejauh ini sudah dilakukan dengan baik.

3. Apakah ada kendala/hambatan dalam mencapai tujuan dan sasaran komite sekolah? Jika ada, apa solusi yang dapat dilakukan?

Jawab: Ada, solusi yang dapat dilakukan agar lebih mengkomunikasikan program-program sekolah kepada orang tua anak didik (siswa/i).

B. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan

1. Bagaimana komite sekolah memberikan dukungan fasilitas sekolah di sekolah ini?

Jawab: melalui penggalangan dana

2. Bagaimana komite sekolah melakukan penggalangan dana untuk fasilitas sekolah di sekolah ini?

Jawab: musyawarah

3. Apakah ada kendala/hambatan komite sekolah dalam memberikan dukungan sumber daya di sekolah ini?

Jawab: ada, solusinya menurut beliau komite sekolah harus lebih aktif dalam musyawarah bersama orang tua anak didik (siswa/i).

C. Adanya komunikasi dengan para pelaksana kebijakan

1. Bagaimana dinas pendidikan mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah pada pihak sekolah?

Jawab: Dinas Pendidikan mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komunikasi Sekolah pada pihak sekolah melalui Rapat dengan guru-guru.

2. Bagaimana pihak sekolah bermusyawarah dengan komite sekolah?

Jawab: dengan mengundang komite sekolah untuk membicarakan permasalahan yang ada.

3. Dalam urusan apa saja pihak sekolah dan komite sekolah bekerjasama?

Jawab: dalam urusan meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah.

4. Bagaimana komite sekolah berkomunikasi dengan orang tua siswa?

Jawab: musyawarah.

D. Adanya program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016

1. Bagaimana sikap dan tanggung jawab komite sekolah dalam membantu pelaksanaan program pemenuhan fasilitas pembelajaran dan penilaian di sekolah ini?

Jawab: sejauh ini sudah baik.

2. Bagaimana sikap dan tanggung jawab komite sekolah dalam membantu pelaksanaan program pemenuhan sarana dan prasarana minimal di sekolah ini?

Jawab: ya sejauh ini sudah baik.

3. Apakah ada kendala/hambatan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan? Jika ada bagaimana cara mengatasinya?

Jawab: sejauh ini tidak ada

E. Adanya peningkatan mutu layanan pendidikan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016

1. Bagaimana komite sekolah menjalankan tugas dan fungsinya agar sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan yang telah ditetapkan?

Jawab: Komite Sekolah menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya harus sejalan dengan visi misi Kepala Sekolah.

2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan komite sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan sekolah di sekolah ini?

Jawab: pengawasan komite sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan sekolah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Apa saja yang sudah dilakukan komite sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah ini?

Jawab: Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsinya dengan maksimal, seperti memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan

kebijakan terkait kebijakan dan program sekolah, kinerja sekolah dan fasilitas pendidikan di sekolah.

4. Apakah ada kendala/hambatan komite sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah ini? Jika ada , apa solusi yang dapat dilakukan?

Jawab: sejauh ini belum ada

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Di SMP Negeri 6 Natal

Biodata Narasumber

Nama : Sri Guswinda, S.Pd

Umur : 26 tahun

Jabatan : Guru kelas

Pendidikan : S.1

A. Tercapainya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014

1. Bagaimana komite sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan program sekolah disekolah ini?

Jawab: melalui musyawarah dengan pihak sekolah orang tua anak didik (siswa/i) dan pertemuan informal.

2. Bagaimana pengawasan komite sekolah dalam pelaksanaan program yang telah dijalankan pihak sekolah di sekolah ini?

Jawab: sejauh ini sudah dilakukan dengan baik.

3. Apakah ada kendala/hambatan dalam mencapai tujuan dan sasaran komite sekolah? Jika ada, apa solusi yang dapat dilakukan?

Jawab: ada, solusi yang dapat dilakukan komite sekolah mampu berperan aktif terhadap perencanaan dan program-program komite secara optimal.

B. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan

1. Bagaimana komite sekolah memberikan dukungan fasilitas sekolah di sekolah ini?

Jawab: musyawarah untuk membicarakan langkah-langkah penggalangan dana.

2. Bagaimana komite sekolah melakukan penggalangan dana untuk fasilitas sekolah di sekolah ini?

Jawab: melalui musyawarah

3. Apakah ada kendala/hambatan komite sekolah dalam memberikan dukungan sumber daya di sekolah ini?

Jawab: ada, solusinya menurut beliau Komite Sekolah lebih mengkomunikasikan masalah fasilitas sekolah kepada orang tua anak didik

C. Adanya komunikasi dengan para pelaksana kebijakan

1. Bagaimana dinas pendidikan mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah pada pihak sekolah?

Jawab: Rapat dengan guru-guru serta pihak terkait.

2. Bagaimana pihak sekolah bermusyawarah dengan komite sekolah?

Jawab: dengan mengundang komite sekolah untuk membicarakan permasalahan yang ada.

3. Dalam urusan apa saja pihak sekolah dan komite sekolah bekerjasama?

Jawab: dalam urusan pelaksanaan program sekolah, fasilitas pendidikan di sekolah, serta pelayanan pendidikan sekolah.

4. Bagaimana komite sekolah berkomunikasi dengan orang tua siswa?

Jawab: melalui musyawarah

D. Adanya program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016

1. Bagaimana sikap dan tanggung jawab komite sekolah dalam membantu pelaksanaan program pemenuhan fasilitas pembelajaran dan penilaian di sekolah ini?

Jawab: Sudah baik

2. Bagaimana sikap dan tanggung jawab komite sekolah dalam membantu pelaksanaan program pemenuhan sarana dan prasarana minimal di sekolah ini?

Jawab: sudah baik

3. Apakah ada kendala/hambatan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan? Jika ada bagaimana cara mengatasinya?

Jawab: belum ada

E. Adanya peningkatan mutu layanan pendidikan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016

1. Bagaimana komite sekolah menjalankan tugas dan fungsinya agar sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan yang telah ditetapkan?

Jawab: Komite Sekolah menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang di ajukan oleh masyarakat maupun orang tua siswa.

2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan komite sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan sekolah di sekolah ini?

Jawab: harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Apa saja yang sudah dilakukan komite sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah ini?

Jawab: Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, seperti memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan terkait kebijakan dan program sekolah, kinerja sekolah dan fasilitas pendidikan di sekolah. Komite sekolah juga melakukan pengawasan dalam pelayanan pendidikan di sekolah.

4. Apakah ada kendala/hambatan komite sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah ini? Jika ada , apa solusi yang dapat dilakukan?

Jawab: sejauh ini belum ada.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Di SMP Negeri 6 Natal

Biodata Narasumber

Nama : Muhammad Ridho Siregar S.Pd

Umur : 34 tahun

Jabatan : Guru kelas

Pendidikan : S.1

A. Tercapainya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014

1. Bagaimana komite sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan program sekolah disekolah ini?

Jawab: melalui musyawarah dengan pihak sekolah orang tua anak didik.

2. Bagaimana pengawasan komite sekolah dalam pelaksanaan program yang telah dijalankan pihak sekolah di sekolah ini?

Jawab: sejauh ini sudah dilakukan dengan baik.

3. Apakah ada kendala/hambatan dalam mencapai tujuan dan sasaran komite sekolah? Jika ada, apa solusi yang dapat dilakukan?

Jawab: ada, solusi yang dapat dilakukan perlu adanya strategi/pendekatan yang handal dalam memberdayakan masyarakat dalam menjalin komunikasi yang efektif dan efisien dalam mengimplementasikan berbagai program kerja sekolah dan program kerja komite sekolah.

B. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan

1. Bagaimana komite sekolah memberikan dukungan fasilitas sekolah di sekolah ini?

Jawab: melalui penggalangan dana

2. Bagaimana komite sekolah melakukan penggalangan dana untuk fasilitas sekolah di sekolah ini?

Jawab: dengan musyawarah

3. Apakah ada kendala/hambatan komite sekolah dalam memberikan dukungan sumber daya di sekolah ini?

Jawab: ada, solusinya menurut beliau komite sekolah harus lebih aktif dalam musyawarah bersama orang tua anak didik.

C. Adanya komunikasi dengan para pelaksana kebijakan

1. Bagaimana dinas pendidikan mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah pada pihak sekolah?

Jawab: Rapat dengan pihak sekolah

2. Bagaimana pihak sekolah bermusyawarah dengan komite sekolah?

Jawab: dengan mengundang komite sekolah untuk musyawarah

3. Dalam urusan apa saja pihak sekolah dan komite sekolah bekerjasama?

Jawab: dalam urusan pelaksanaan program sekolah, fasilitas pendidikan di sekolah, serta pelayanan pendidikan sekolah.

4. Bagaimana komite sekolah berkomunikasi dengan orang tua siswa?

Jawab: dengan musyawarah mufakat

D. Adanya program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016

1. Bagaimana sikap dan tanggung jawab komite sekolah dalam membantu pelaksanaan program pemenuhan fasilitas pembelajaran dan penilaian di sekolah ini?

Jawab: sejauh ini baik

2. Bagaimana sikap dan tanggung jawab komite sekolah dalam membantu pelaksanaan program pemenuhan sarana dan prasarana minimal di sekolah ini?

Jawab: sejauh ini baik

3. Apakah ada kendala/hambatan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan? Jika ada bagaimana cara mengatasinya?

Jawab: tidak ada

E. Adanya peningkatan mutu layanan pendidikan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016

1. Bagaimana komite sekolah menjalankan tugas dan fungsinya agar sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan yang telah ditetapkan?

Jawab: terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak sekolah

2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan komite sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan sekolah di sekolah ini?

Jawab: harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Apa saja yang sudah dilakukan komite sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah ini?

Jawab: Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsinya seperti mengawasi keaktifan kinerja Kepala Sekolah dan guru-guru.

4. Apakah ada kendala/hambatan komite sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah ini? Jika ada, apa solusi yang dapat dilakukan?

Jawab: sejauh ini tidak ada

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi: Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Di SMP Negeri 6 Natal

Biodata Narasumber

Nama : Ermi, S.Pd

Umur : 30 tahun

Jabatan : Guru kelas

Pendidikan : S.1

A. Tercapainya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014

1. Bagaimana komite sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan program sekolah disekolah ini?

Jawab: melalui musyawarah dan melakukan pertemuan informal.

2. Bagaimana pengawasan komite sekolah dalam pelaksanaan program yang telah dijalankan pihak sekolah di sekolah ini?

Jawab: sudah dilakukan dengan baik

3. Apakah ada kendala/hambatan dalam mencapai tujuan dan sasaran komite sekolah? Jika ada, apa solusi yang dapat dilakukan?

Jawab: ada, solusi yang dapat dilakukan Komite Sekolah menjalin komunikasi yang efektif kepada orang tua siswa.

B. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan

1. Bagaimana komite sekolah memberikan dukungan fasilitas sekolah di sekolah ini?

Jawab: dengan penggalangan dana.

2. Bagaimana komite sekolah melakukan penggalangan dana untuk fasilitas sekolah di sekolah ini?

Jawab: dengan musyawarah.

3. Apakah ada kendala/hambatan komite sekolah dalam memberikan dukungan sumber daya di sekolah ini?

Jawab: ada, solusinya menurut beliau Komite Sekolah lebih mengkomunikasikan masalah fasilitas sekolah kepada orang tua anak didik (siswa/i).

C. Adanya komunikasi dengan para pelaksana kebijakan

1. Bagaimana dinas pendidikan mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah pada pihak sekolah?

Jawab: melalui Rapat dengan pihak sekolah.

2. Bagaimana pihak sekolah bermusyawarah dengan komite sekolah?

Jawab: dengan mengundang komite sekolah untuk membicarakan permasalahan yang ada

3. Dalam urusan apa saja pihak sekolah dan komite sekolah bekerjasama?

Jawab: beliau dalam urusan pelaksanaan program sekolah, fasilitas pendidikan di sekolah, serta pelayanan pendidikan sekolah.

4. Bagaimana komite sekolah berkomunikasi dengan orang tua siswa?

Jawab: dengan musyawarah.

D. Adanya program yang dilaksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016

1. Bagaimana sikap dan tanggung jawab komite sekolah dalam membantu pelaksanaan program pemenuhan fasilitas pembelajaran dan penilaian di sekolah ini?

Jawab: sudah baik

2. Bagaimana sikap dan tanggung jawab komite sekolah dalam membantu pelaksanaan program pemenuhan sarana dan prasarana minimal di sekolah ini?

Jawab: sudah baik

3. Apakah ada kendala/hambatan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan? Jika ada bagaimana cara mengatasinya?

Jawab: tidak ada

E. Adanya peningkatan mutu layanan pendidikan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016

1. Bagaimana komite sekolah menjalankan tugas dan fungsinya agar sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan yang telah ditetapkan?

Jawab: Komite Sekolah menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bekerjasama dengan pihak sekolah dan orang tua siswa.

2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan komite sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan sekolah di sekolah ini?

Jawab: pengawasan komite sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan sekolah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Apa saja yang sudah dilakukan komite sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah ini?

Jawab: Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Kemudian Komite sekolah juga melakukan pengawasan dalam pelayanan pendidikan di sekolah.

4. Apakah ada kendala/hambatan komite sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah ini? Jika ada , apa solusi yang dapat dilakukan?

Jawab: sejauh ini tidak ada.

